

INSIDEN MONAS DALAM BINGKAI MEDIA
(Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008,
di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Guna Memenuhi Gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)

Disusun Oleh :
PANCA OKTA HUTABRINA
NIM. 04210126

FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panca Okta Hutabrina
NIM : 04210126
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Insiden Monas Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008, Di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)”** adalah asli hasil karya dan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Yang membuat pernyataan,



Panca Okta Hutabrina



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri Panca Okta Hutabrina

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengarahkan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Panca Okta Hutabrina

NIM : 04210126

Judul Skripsi : Insiden Monas Dalam Bingkai Media

(Analisis Framing Berita Seputar Insiden Monas 1 Juni 2008

Di Harian Kompas Dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah, Jurusan/Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunaqoshahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 April 2009

Pembimbing I

Drs. Abdul Rozak, M.Pd

NIP. 150267657

Pembimbing II

Andayani, M.SW

NIP. 150292260



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1520/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

INSIDEN MONAS DALAM BINGKAI MEDIA
(Analisis Framing Berita Seputar Insiden Monas 1 Juni 2008 di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Panca Okta Hutabrina
NIM : 04210126
dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Oktober 2009
Nilai Munaqasyah : A-

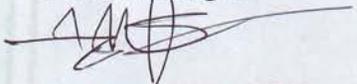
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

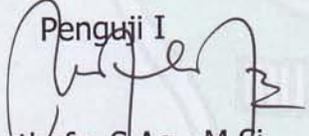
Pembimbing I


Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP. 19671006 199403 1 003

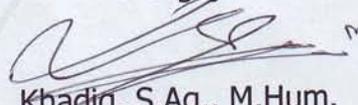
Pembimbing II


Andayani, SIP.,MSW
NIP. 19721016 199003 2 008

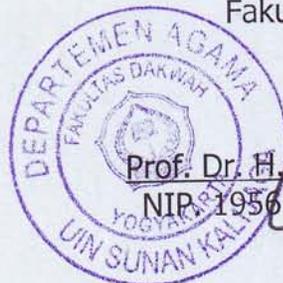
Penguji I

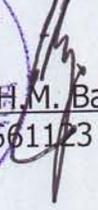

Musthofa, S.Ag., M.Si.
NIP. 19680103 199503 1 001

Penguji II


Khadiq, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19700125 199903 1 001

Yogyakarta, 8 Nopember 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

*Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah*

(Ali 'Imran: 159)

Persembahan

Untuk yang tercinta bapak dan ibuku,
Jamaluddin. R dan Maryanah

Yang tersayang 'kakak' dan adik-adikku,
Dartono Davikun, Ramdhani Suci Yadi,
dan Hijriyah

Yang kubanggakan almamaterku,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadit Allah SWT atas kelimpahan rahmat, taufiq, hidayah, inayah, dan kemudahan, serta kelancaran dalam proses pengerjaan karya sederhana ini hingga selesai sekarang. Sebab dengan izin-Nya lah, karya skripsi ini terwujud.

Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penulis berharap karya ini merupakan bagian dari upaya menggapai keridhoan-Nya.

Skripsi berjudul INSIDEN MONAS DALAM BINGKAI MEDIA (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas 1 Juni 2008 di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008) ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) di Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk pematangan mental dan intelektualitas penulis selama belajar di perkuliahan dari titik awal sampai dengan akhir.

Insiden Monas adalah istilah yang digunakan oleh media dalam laporannya mengenai peristiwa bentrokan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008. Insiden ini menjadi berita yang hangat diperbincangkan diberbagai media baik cetak maupun elektronik, karena terjadi tepat pada hari kelahiran Pancasila.

Media massa Indonesia memberikan porsi yang cukup besar dalam memberitakan insiden Monas ini. Masing-masing media memiliki pandangan dan penyajian berita yang beragam dalam menanggapi insiden Monas tersebut. Tak terkecuali surat kabar harian nasional, *Kompas* dan *Republika*, dua media yang diteliti. Penulis memakai analisis *framing* untuk menganalisa teks berita dari harian *Kompas* dan *Republika*.

Dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu, memberi dukungan, baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M Bahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Abdul Rozak, MPd dan Ibu Andayani, MSW selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, maupun kritik dan sarannya selama ini.
5. Khadiq, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberi saran maupun kritik selama menjadi mahasiswa dari tingkat awal hingga akhir.
6. Penguji. Terima kasih atas segala kritik, saran maupun masukannya untuk perbaikan karya ini.

7. Semua staf pengajar di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di dunia mupun akhirat, serta diberikan keberkahan dan pahala yang selalu mengalir oleh Allah SWT.
8. Kepada Ibu dan Bapakku tercinta: penulis mohon maaf karena mestinya tidak pindah kuliah sehingga bisa lulus lebih cepat. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, do'a dan didikannya dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi Ibu dan Bapak karena bagiku kalian adalah orang yang paling berjasa kedua di dunia setelah Rasulullah.
9. 'Kakak' dan adik-adikku tercinta, terima kasih atas pengertian, kesabaran, nasihat, dan dukungannya baik moril maupun materil selama ini.
10. Saudariku, Mbak Lia. Terima kasih untuk pinjaman laptopnya selama penulis *garap* skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan kelipatgandaan pahala.
11. Saudaraku Rahmanto, yang baru saja menyempurnakan separuh dien. Terima kasih atas sumbangan fikiran dan pinjaman printernya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang melimpah dan diberkahi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.
12. Saudari-saudariku di kontrakan Rumah Kita 'Ruki', Ulfa, Yanti, Uswah, Muroh, dan Yuni, terkhusus untuk sahabat setiaku, Endang Astuti yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih atas persahabatan dan persaudaraannya selama ini.

13. Teman-teman kost Rumah Ijo, Mbak Eta, Wahyu, Lina, Yuce, dan Mbak Ani.
Terima kasih atas pengertian, dukungan dan persahabatannya selama ini.

14. Teman-teman seangkatan di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Endang Astuti, Yanti, Lala, Nurul, Acie, Khotim, Nunu, Risna, Nida, Ain, Diah, Vepti, Siti, Anggi, Riska, Ahmad, Agus NC, Fathul Rijal, Mukhlisin, Sholeh, Ardi, Muizzu, Ivan, Biru, Muhlis, Dodi, dll, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kesetiakawanan, solidaritas, pengertian dan dukungannya selama ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik material maupun spiritualnya selama ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tentu memiliki kekurangan dan kelemahan. Seperti pepatah mengatakan, "Tak ada gading yang tak retak". Keterbatasan kemampuan, pikiran, tenaga, waktu, dan hal-hal lainnya membuat karya ini belumlah sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun selalu dinantikan penulis sehingga tulisan ini tidak hanya berhenti sampai di sini tetapi tetap dalam kajian keilmuan yang tak pernah surut.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi inspirasi bagi diskusi dan penelitian dalam bidang teks media berikutnya. Amin

Wallaahu a'lam bi shawab.

Gendeng, 17 Januari 2009

Panca Okta Hutabrina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Landasan Teoritis	12
1. Konstruksi Sosial atas Realitas	12
2. Konstruksi Realitas dalam Media	16
3. Ideologi Media	18
4. Proses Pembentukan dan Produksi Berita	20
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26

2. Fokus Penelitian	26
3. Jenis Sumber Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
BAB II. GAMBARAN UMUM HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA	37
A. Harian Kompas	37
B. Harian Republika	45
BAB III. FRAMING TEKS BERITA	53
A. Teks Berita di Harian Kompas dan Republika	53
B. <i>Framing</i> Berita Harian Kompas	57
C. <i>Framing</i> Berita Harian Republika	75
D. Perbandingan <i>Fram</i> Harian Kompas dan Republika	94
BAB IV. PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
C. Penutup	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

ABSTRAK

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Realitas tersebut tidak serta merta melahirkan berita, melainkan melalui proses interaksi antara penulis berita (wartawan) dengan fakta sehingga menimbulkan wacana yang bermakna. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan.

Konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersikap lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Penelitian ini menganalisis pemberitaan Harian *Kompas* dan *Republika* dengan menggunakan metode analisis framing dari model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang meneliti unsur-unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari sebuah berita.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa *Kompas* dan *Republika* memiliki kecenderungan keberpihakan yang berbeda dalam memberitakan insiden Monas. *Kompas* memaknai insiden Monas sebagai aksi kekerasan yang mencederai kebhinekaan. *Kompas* secara implisit berusaha menampilkan pemberitaan yang berkecenderungan mengarah pada penentangan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan FPI. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan pendapat narasumber yang menentang dan mengecam aksi kekerasan FPI. Sedangkan *Republika* memaknainya sebagai masalah negara yang lamban menyelesaikan Ahmadiyah. *Republika* secara implisit mencoba menghadirkan berita yang memiliki tendensi terhadap pembubaran Ahmadiyah. Tampilan beritanya berupa paparan pendapat para ulama dan tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Insiden Monas Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008, di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)”. Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap penelitian ini, maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

1. Insiden Monas

Insiden Monas adalah istilah yang digunakan oleh media dalam laporannya mengenai peristiwa bentrokan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008.¹

2. Bingkai Media

Menurut Todd Gitlin, bingkai media (*frame media*) adalah sebuah strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Bingkai media diperlihatkan melalui konsepsi dan skema interpretasi wartawan dalam menyusun, mengisahkan, menulis, dan menekankan fakta dari suatu peristiwa atau isu tertentu.²

¹ *Insiden Monas Juni 2008*, http://www.wikipedia.org/wiki/Insiden_Monas_Juni_2008, diakses 23 Agustus 2008.

² Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 68.

3. Analisis *Framing*

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks media yang dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media, dalam hal ini harian *Kompas* dan *Republika*.³

4. Berita

Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.⁴ Dalam penelitian ini, berita yang dimaksud adalah berita seputar insiden Monas periode 2-8 juni 2008.

5. Harian *Kompas* dan *Republika*

Harian (surat kabar) adalah sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa cetak, berupa lembaran berita-berita, karangan-karangan manusia yang diterbitkan secara berkala setiap hari serta diedarkan secara umum. Isinya harus aktual dan bersifat universal, maksudnya pemberitaannya harus terkait dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan.⁵

Harian *Kompas* adalah salah satu surat kabar harian nasional Indonesia yang merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia. Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat, namun atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi *Kompas*, yang artinya sebagai media pencari fakta dari segala penjuru. *Kompas* terbit pertama kali pada Senin, 28 Juni 1965 dengan motto "Amanat Hati Nurani Rakyat",

³ *Ibid.* hlm. 10

⁴ Hikmat Kusumaningrat dkk, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005)

⁵ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 257.

setebal empat halaman, dicetak 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, *Kompas* merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Saat ini, pembaca harian yang memiliki visi *humanisme trancedental* ini telah mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia.⁶

Sedangkan harian *Republika* adalah salah satu surat kabar harian nasional Indonesia yang didirikan atas inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). *Republika* lahir pada 19 Desember 1992 dan terbit perdana pada 4 Januari 1993 di bawah bendera PT Abdi Bangsa dengan motto “Pegangan Kebenaran” yang berdasarkan pada pemahaman Rahmatan Lil ‘Alamin. Pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi *holding company*, dan *Republika* berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Walau berganti kepemilikan, *Republika* tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi *Republika* menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang, makin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim.

Jadi yang dimaksud dengan judul “Insiden Monas dalam Bingkai Media (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008, di

⁶ F. A Santoso, *Sejarah, Organisasi, dan Visi Misi Kompas*, PT. Kompas Media Nusantara.

Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)” dalam penelitian ini adalah pembentukan dan penyederhanaan makna dan realitas tentang insiden Monas yang diberitakan oleh media massa dalam hal ini media cetak nasional, yakni *Kompas* dan *Republika* periode 2-8 Juni 2008, melalui analisis *framing*.

B. Latar Belakang Masalah

Bentrokan yang melibatkan massa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan massa dari Front Pembela Islam (FPI) pada 1 Juni 2008 lalu, atau yang lebih dikenal dengan Insiden Monas, menjadi berita yang hangat diberbagai media baik cetak maupun elektronik dalam beberapa bulan yang lalu, karena terjadi tepat pada hari kelahiran Pancasila.

Insiden ini bermula ketika FPI akan menggelar aksi di Monas Jakarta dan AKKBB di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta, pada 1 Juni 2008. Namun, di luar rencana, saat hampir tiba di Bunderan HI, massa AKKBB berbelok arah menuju ke Monas yang saat itu sudah dipenuhi massa dari FPI. Akhirnya, bentrokan pun tak dapat terhindarkan lagi. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abu Bakar Nataprawira membantah polisi telah melakukan pembiaran pada aksi yang dikawal polisi ini.⁷

Munarman sebagai ketua Laskar Islam menyatakan bahwa insiden itu dilakukan karena aksi AKKBB merupakan aksi kelompok pendukung Ahmadiyah, dan bukan untuk peringatan hari Pancasila. Sementara, Ketua Forum Umat Muslim, Mashadi, juga menunjukkan video yang diklaim

⁷ *Insiden Monas Juni 2008*, http://www.wikipedia.org/wiki/Insiden_Monas_Juni_2008, diakses 23 Agustus 2008.

sebagai provokasi kepada pihak FPI dan menyebabkan FPI menyerang AKKBB. Video tersebut berisi gambar seorang peserta aksi yang diduga kelompok aliansi akan mengeluarkan senjata, namun tak jelas bentuknya.⁸

Media massa Indonesia, memberikan porsi yang cukup besar dalam memberitakan Insiden Monas ini, tak terkecuali dua surat kabar harian nasional, *Kompas* dan *Republika*. Dua media cetak ini memberikan pandangan yang cukup berbeda mengenai insiden Monas. Harian *Kompas* yang dikenal dengan visi humanisme-nya dan pada mulanya diterbitkan oleh partai Katolik dan sejumlah jurnalis Katolik yang kemudian berubah menjadi koran independent, mengupas insiden Monas sebagai persoalan bangsa dengan menyetengahkan judul-judul berita seperti “Kebhinnekaan Dicederai, Setidaknya 12 Peserta AKKBB Terluka Akibat Kekerasan FPI”; “Negara Tidak Boleh Kalah, Rizieq Ditemui Polisi Berpakaian Sipil dari Polda Metro Jaya”; serta “Ketua FPI Menjadi Tersangka, Kepala Polri: Munarman Masuk dalam DPO”.

Sementara *Republika*, yang didirikan atas inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan secara terbuka mendefinisikan dirinya sebagai koran Islam yang mencoba menghadirkan pemberitaan dalam perspektif Islam, lebih memilih untuk menempatkan diri di posisi kaum muslim dengan memaknai insiden tersebut sebagai persoalan agama. Media ini menyajikan berita-berita dengan judul antara lain “Bentrokan Akibat Pemerintah Lamban”; “Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi, Ada

⁸ *Ibid.*

Kecenderungan Pergeseran Isu Dari Pembubaran Ahmadiyah ke FPI”; serta “Akar Masalahnya Ahmadiyah, Pemerintah Dinilai Tidak Tegas Terhadap Ahmadiyah”.

Dari kumpulan judul-judul ini, pandangan kedua media cetak mengenai insiden Monas tampak menarik untuk dikaji. *Kompas* dengan visi humanismenya, memuat berita-berita yang berisi “penentangan” terhadap aksi kekerasan yang dilakukan FPI. Sebaliknya, *Republika* memuat berita-berita yang berisi “desakan” kepada pemerintah agar segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang Penghentian Kegiatan Ahmadiyah karena Ahmadiyah dinilai sebagai akar masalah dari bentrokan yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008 itu.

Dari perbedaan berita yang disampaikan, terlihat adanya keterlibatan ideologi dari masing-masing surat kabar harian nasional tersebut. Sebuah teks, tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Sementara ideologi sendiri merupakan sebuah konsep dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini disebabkan karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.⁹

Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang

⁹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 60-61

memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/latar belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bingkai (*frame*) pemberitaan di media mengenai insiden Monas dapat berbeda satu dengan yang lain, sekalipun mengangkat peristiwa yang sama.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut karakter pemberitaan harian *Kompas* dan *Republika* mengenai insiden Monas jika dilihat dari proses pembingkai masalah ini pada berita-beritanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah harian *Kompas* dan *Republika* membingkai (*mem-frame*) peristiwa seputar Insiden Monas?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bingkai (*frame*) yang terbentuk dalam berita-berita mengenai Insiden Monas pada harian *Kompas* dan *Republika*.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- Memperkaya khazanah ilmu komunikasi khususnya bidang manajemen komunikasi dan media massa untuk memperlihatkan karakter pemberitaan media massa, dalam hal ini media cetak.
- Memberikan gambaran mengenai bingkai media (news frame) dari harian umum *Kompas* dan *Republika* ketika memberitakan sebuah peristiwa, khususnya insiden Monas.

2. Praktis

- Memberikan kontribusi pemikiran bagi profesional media tentang bagaimana mengkonstruksi sebuah pesan dengan idealisme tertentu, sehingga dapat menghasilkan dampak yang diinginkan dari khalayak.
- Memberikan pengetahuan kepada khalayak media tentang proses framing yang dilakukan oleh media massa.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan pengetahuan peneliti, berkenaan dengan penelitian yang telah ada, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Rofiq Anwar¹⁰ telah melakukan penelitian dengan judul “Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya Terhadap Irak (Penelitian terhadap Teks Berita-Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak dalam Media *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas* dengan Pendekatan Konstruksionis dan

¹⁰ Anwar, Rofiq, *Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya Terhadap Irak (Penelitian terhadap Teks Berita-Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak dalam Media Kedaulatan Rakyat dan Bernas dengan Pendekatan Konstruksionis dan Metode Analisis Framing)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2004).

Metode Analisis Framing)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai (*frame*) yang terbentuk dalam berita-berita mengenai peristiwa Invasi AS dan sekutunya terhadap Irak pada Surat Kabar Harian (SKH) *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas*.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pemberitaan invasi Amerika Serikat dan sekutunya, terdapat pendefinisian, penyeleksian dan penonjolan realitas dalam berita yang dikutip dari pihak-pihak yang berkuasa secara politik maupun ekonomi, seperti media massa dan kantor berita internasional, pejabat pemerintah/negara, militer, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan *frame* berita tampil menonjol pada sisi tertentu dan tidak pada sisi yang lain. Misalnya: pemberitaan mengenai perang fisik di Irak. Dalam sampel teks berita yang diteliti, pihak koalisi pimpinan AS ditampilkan menjadi subyek penyerang yang mendominasi perang. Sedangkan Irak ditampilkan cenderung sebagai obyek penderita. Pemberitaan yang semacam ini tentu menguntungkan pihak koalisi dan merugikan pihak Irak.

Bila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Rofiq Anwar menggunakan media cetak lokal sebagai subjek penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan media cetak nasional. Selain itu, penelitian Rofik Anwar juga membahas tentang karakteristik praktik jurnalistik media *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas* dalam memberitakan peristiwa Invasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak karena kedua media lokal tersebut mengkonstruksi berita bukan berdasar fakta lapangan (dilakukan wartawannya

sendiri) namun tinggal mengambil dan menseleksi dari teks media dan kantor berita internasional, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak membahas hal tersebut karena *Kompas* dan *Republika* mengkonstruksi berita berdasarkan fakta lapangan (dilakukan wartawannya sendiri).

Purwadi¹¹ juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Media dan Wacana Solo Sebagai *City Walk* (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Wacana Solo sebagai *City Walk* pada Harian Umum Solopos dan Suara Merdeka Periode Maret-Juni 2006)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan tentang adanya kecenderungan masing-masing media, *Solopos* dan *Suara Merdeka*, dalam membingkai pemberitaan seputar wacana Solo sebagai *city walk*.

Dari sejumlah teks berita yang dianalisa, *Solopos* pada dasarnya secara implisit berusaha menampilkan pemberitaan yang berkecenderungan mengarah pada penolakan rencana pemberlakuan program tersebut. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan kritik yang cukup pedas dalam menanggapi *city walk*. Sedangkan *Suara Merdeka* secara implisit mencoba menghadirkan berita-berita yang memiliki tendensi untuk mendukung adanya rencana pemberlakuan *city walk* Pemkot Solo. Tampilan beritanya berupa paparan dan kritik yang tidak terlalu pedas atau bisa dikatakan *soft* (lembut) menanggapi rencana *city walk*.

Selain itu, peneliti juga memaparkan tentang faktor-faktor yang

¹¹ Purwadi, *Media dan Wacana Solo Sebagai City Walk (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Wacana Solo sebagai City Walk pada Harian Umum Solopos dan Suara Merdeka Periode Maret-Juni 2006)*, (Surakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2007).

mempengaruhi *framing* (pembingkai) kedua media tersebut berdasarkan pada pandangan pengelola media (khususnya wartawan), visi misi media dan narasumber berita.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Purwadi dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis hanya meneliti teks berita media untuk mengetahui bingkai (*frame*) yang terbentuk tanpa meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembingkaiannya.

Selain itu, Marliana Ngatmin¹² juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Framing Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Republika”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media *Kompas* dan *Republika* dalam membingkai berita kasus poligami Aa Gym berdasarkan konsep framing dari Robert M. Entman.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa surat kabar harian *Kompas* membingkai berita poligami Aa Gym sebagai masalah sosial Islam. Sebab aktor dari pelaku poligami ini adalah seorang publik figur yang begitu dikagumi oleh banyak jama’ahnya. Namun dengan adanya kasus poligami yang dilakukannya, banyak protes yang datang dari berbagai kalangan. Mereka menganggap pernikahan kedua Aa Gym merupakan contoh yang tidak baik bagi jama’ahnya, terutama kaum lelaki. Akibat dari reaksi yang begitu banyak dari masyarakat, maka pemerintahpun ikut andil dalam masalah ini, yaitu dengan merevisi PP No. 10/1983.

¹² Marliana Ngatmin, *Analisis Framing Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Republika*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

Sedangkan surat kabar harian *Republika* membingkai berita poligami yang dilakukan oleh Aa Gym sebagai masalah hukum Islam. Dalam kasus ini *Republika* lebih memandang permasalahan poligami dari sisi hukum Islam. Dimana poligami dalam Islam tidak dilarang, bahkan Rasulullah juga mengijinkannya, asal saja melalui proses dan ketentuan ketat yang berlaku dalam hukum Islam. Tidak ada yang salah dengan poligami yang dilakukan oleh Aa Gym, sebab dia telah melalui ketentuan ketat yang berlaku dalam Islam.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Marlina Ngatmin tersebut terdapat pada model analisis framingnya. Marlina Ngatmin menggunakan model analisis framing Robert M Entman, sedangkan penulis menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki.

G. Landasan Teori

1. Konstruksi Sosial atas Realitas

Istilah konstruksi sosial (teori konstruksi sosial atas realitas) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Realitas menurut Berger tidak dibentuk secara ilmiah. Tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini realitas berwujud ganda/plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas,

berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing individu.¹³

Secara ringkas, Berger dan Luckman mengatakan bahwa telah terjadi dialektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat yang menciptakan individu. Proses dialektika ini berlangsung dalam tiga momen simultan. Pertama, *eksternalisasi*, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia – dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.¹⁴

Kedua, *objektivasi*, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi –kebudayaan- itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat dihadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang

¹³ Eryanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 14.

telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia, ada "di sana" bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Ketiga, *internalisasi*. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Selain plural, konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Di dalamnya terjadi proses dialektis antara realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif berkaitan dengan interpretasi dan pemaknaan tiap individu terhadap suatu objek. Hasil dari relasi antara objek dan individu menghasilkan penafsiran, yang berbeda-beda berdasarkan beraneka ragam latar belakang individu tersebut. Dimensi objektif dari realitas berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang ada di luar objek, seperti norma, aturan, atau stimulan tertentu yang menggerakkan objek.¹⁵

Fokus dari pendekatan konstruksionis adalah bagaimana pesan dibuat dan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan itu secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima. Pendekatan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16.

konstruksionis memusatkan perhatian kepada bagaimana seseorang membuat gambaran mengenai suatu peristiwa, personalitas, konstruksi melalui mana realitas dibentuk dan dibuahi. Semua individu, lembaga atau kelompok memiliki peran yang sama dalam menafsirkan dan mengkonstruksi peristiwa.¹⁶

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis.¹⁷ *Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Kata makna itu sendiri menunjuk kepada sesuatu yang diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditentukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu peran.

Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang terus-menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukanlah sesuatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak. Dari sumber (komunikator), pendekatan konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dalam sisi penerima ia memaksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Pesan dipandang sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta suatu peristiwa apa adanya. Seorang

¹⁶ Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*, (Yogyakarta, 2000), hal. 21-22 dikutip oleh Kasiyanto, *Analisis Wacana dan Teoritis Penafsiran Teks* dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta, 2005), hal. 155.

¹⁷ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 40.

komunikator dengan realitas yang ada akan menampilkan fakta tertentu kepada publik, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.

2. Konstruksi Realitas dalam Media

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan. Pembuatan berita di media massa sebenarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”.¹⁸

Isi media pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan, bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya.¹⁹

Media massa dilihat sebagai media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka berusaha menonjolkan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim

¹⁸ Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 88.

¹⁹ *Ibid.*

interpretatif masing-masing dalam rangka memaknai objek wacana.²⁰ Keterlibatan mereka dalam suatu diskusi sangat dipengaruhi oleh status, wawasan, dan pengalaman sosial masing-masing. Dalam konteks inilah, media kemudian menjadi arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu objek wacana. Perdebatan yang terjadi di dalamnya dilakukan dengan cara-cara yang simbolik, sehingga lazim ditemukan bermacam-macam perangkat linguistik atau perangkat wacana yang umumnya menyiratkan tendensi untuk melegitimasi diri sendiri dan mendelegitimasi pihak lawan.

Manakala konstruk realitas media berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bisa terwujud melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. Singkatnya, kekerasan simbolik tak hanya beroperasi lewat bahasa, namun juga terjadi pada isi bahasa itu sendiri, yakni pada apa yang diucapkan, disampaikan atau diekspresikan.²¹

Menurut Defleur dan Ball-Rokeach (1989),²² ada berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna ini, antara lain: mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama dari sebuah

²⁰ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 220-221.

²¹ J. Anto, "Menelaah Pemberitaan Sampit di Media Pers; Media Sekedar Memindahkan Arena Konflik?", *Jurnal Media Watch Kupas* Vol. 3, No. 2, 2001, hal. 26-29 dikutip oleh Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm 89.

²² Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 90.

istilah dengan makna baru; memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam sistem bahasa. Dengan begitu, penggunaan bahasa tertentu jelas berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas turut menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Berkenaan dengan hal tersebut, media massa pada dasarnya melakukan berbagai tindakan dalam konstruksi realitas dimana hasil akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna dan citra tentang suatu realitas.

3. Ideologi Media

Ada banyak pengertian ideologi. Dengan kata lain, ideologi dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Dalam pengertian umum, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antarpribadi.

Ideologi merupakan konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.²³

James Lull berpendapat, ideologi merupakan ungkapan yang paling tepat untuk mendeskripsikan nilai dan agenda publik dari bangsa, kelompok agama, kandidat politik dan sebagainya. Sedang menurut Gramsci, ideologi lebih dari sekadar sistem ide. Ia membedakan antara

²³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 13.

sistem yang berubah-ubah (*arbitrary systems*) dan ideologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideologies*). Ideologi, menurut Gramsci, bukanlah fantasi perorangan, namun menjelma menjadi cara hidup kolektif masyarakat.

Di lain pihak, Ramlan Surbakti mengklasifikasikan ideologi ke dalam dua pengertian. *Pertama*, ideologi secara fungsional yakni seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama; atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. *Kedua*, ideologi secara struktural yakni sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Istilah ideologi memang dapat dipergunakan dalam banyak arti. Namun menurut Frans Magnis Suseno, pada hakikatnya semua arti itu dapat dikembalikan pada salah satu (atau kombinasi) dari tiga arti yaitu: (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dapat pula didefinisikan sebagai keyakinan tidak ilmiah.²⁴

Kenyataan menunjukkan bahwa media (pers) bukan sesuatu yang murni objektif. Pers bukan alat potret mekanik yang mampu menampilkan dan menggambarkan suatu peristiwa serta kejadian dengan apa adanya. Keterbatasan teknik jurnalistik dan berbagai kepentingan manusia yang ada di balik pers (media massa) menyebabkan pemotretan dan

²⁴ Lebih jauh baca Alex Sobur, *ibid*, hlm. 64-68.

penggambaran yang dilakukan media mengalami reduksi, simplifikasi, dan interpretasi.²⁵

Menurut Brian McNair, seperti dikutip Agus Sudibyo, dalam studi media ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media. *Pertama*, pendekatan politik-ekonomi (*the political-economy approach*). Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. *Kedua*, pendekatan organisasi (*organizational approach*). Dalam pendekatan ini, pengelola media dipandang sebagai pihak yang aktif dari proses pembentukan dan produksi berita. *Ketiga*, pendekatan kulturalis (*cultural approach*). Pendekatan ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan di atas.²⁶

Sementara itu, Daniel Hallin membuat ilustrasi dan gambaran menarik—seperti yang terlihat di bawah—bagaimana berita kita tempatkan ke dalam bidang atau peta ideologi. Ia membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang. Yaitu *pertama*, bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), bidang kontroversi (*sphere of legitimate controversy*) dan bidang konsensus (*sphere of consensus*). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis.²⁷

4. Proses Pembentukan dan Produksi Berita

Proses *framing* berkaitan erat dengan rutinitas dan konvensi

²⁵ Arifatul Choiri Fauzi, *Kabar-Kabar Kekerasan dari Bali*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 6.

²⁶ Lebih jauh baca Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, cet. IV 2009), hlm. 2-7.

²⁷ Eriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 127.

profesional jurnalistik.²⁸ Proses *framing* tidak dapat dipisahkan dari strategi pengolahan dan penyajian informasi dalam presentasi media, dengan kata lain proses *framing* merupakan bagian yang integral dari proses redaksional media massa. Dominasi sebuah *frame* dalam wacana berita bagaimanapun berkaitan dengan proses produksi berita yang melibatkan unsur-unsur redaksional: reporter, redaktur, dan lain-lain. Dalam konteks ini, awak media lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, serta memparafrasekan dan membatasi pernyataan sumber berita. Di lain waktu, mereka juga menjabarkan *frame* interpretatif mereka sendiri, serta retorika-retorika yang menyiratkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu.²⁹

Berita pada dasarnya terbentuk lewat proses aktif dari pembuat berita. Suatu peristiwa yang tidak beraturan, kompleks disederhanakan dan dibuat bermakna oleh pembuat berita (wartawan). Semua proses tersebut melibatkan proses lewat skema interpretasi dari pembuat berita.

Pekerjaan utama pembuat berita, dalam hal ini wartawan, adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Dengan demikian, mereka selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (*news*), karangan khas (*feature*), atau

²⁸ Zhondang pan dan Gerald M. Kosicki, "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*", (dalam *Political Communication*, Taylor & Francis, 10, 1993, hal. 50) dikutip oleh Agus Sudibyo, *Op. Cit.*, hal. 222.

²⁹ Gamson dan Modigliani, "*Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach*" (dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 95 (1), 1989, hal. 3) dikutip oleh Agus Sudibyo, *Ibid.*, hal 224.

gabungan keduanya (*news-feature*). Karena menceritakan pelbagai kejadian atau peristiwa itulah, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Laporan-laporan jurnalistik di media pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam bentuk sebuah cerita.³⁰

Proses pembentukan berita merupakan proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi mempengaruhi. Oleh sebab itu, niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dan presentasi media. Apa yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan.

Pertama, faktor individual. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personel dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak akan mempengaruhi apa yang akan ditampilkan media. Aspek personel tersebut secara hipotetik mempengaruhi skema pemahaman pengelola media.

Kedua, level rutinitas media. Berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang

³⁰ Alex Sobur, *Op. Cit.*, hal 89.

berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada didalamnya.

Ketiga, level organisasi. Berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang berada dalam organisasi tersebut. Masing-masing organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan.

Keempat, level ekstra media. Faktor ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media, antara lain sumber berita, sumber penghasilan media, pemerintah, lingkungan bisnis dan lain sebagainya.

Kelima, level ideologi. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Elemen ini bersifat abstrak, ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Berita, dalam pandangan Fishman, bukanlah refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada di luar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah berita merefleksikan realitas. Tetapi berita adalah apa yang pembuat berita buat.³¹ Hal itu selaras dengan pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk (dikonstruksi).

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses

³¹ Eriyanto, *Op. Cit.*, hal. 100.

produksi berita dilihat.³² Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Dalam bentuknya yang umum, pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil berada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita.

Pandangan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Perspektif ini menganggap peristiwa ini bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Titik perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu.

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Wartawan menentukan batasan-batasan mana yang dianggap berita dan mana yang tidak.

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu.³³ Setiap hari ada jutaan fakta atau peristiwa di dunia ini dan semuanya potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan

³² Mark Fishman, *Manufacturing News*, (Austin: University of Texas Press, 1980), terutama hal 13-14 dikutip oleh Eriyanto, *Ibid.*, hal 100-101.

³³ Eriyanto, *Op. Cit.*, hal. 102.

dihitung, mana berita dan mana bukan berita. Berita, karenanya, peristiwa yang ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri.

Setiap peristiwa tidak lantas dapat disebut sebagai berita, tetapi ia harus dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita. Nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Nilai jurnalistik menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan. Ketika seorang wartawan mengatakan sebagai berita, peristiwa diseleksi menurut aturan-aturan tertentu. Hanya peristiwa yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu saja yang layak dan bisa disebut berita. Ini merupakan prosedur pertama dari bagaimana dikonstruksi. Tidak semua aspek dari peristiwa juga dilaporkan, ia juga harus dinilai terlebih dahulu, bagian mana dari peristiwa yang mempunyai nilai berita tinggi –bagian itulah yang terus-menerus dilaporkan.³⁴

Nilai berita yang dimaksud tersebut antara lain *significant* (penting). Yakni kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. *Magnitude* (besaran) yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca. *Timeliness* (waktu) yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi atau baru diketemukan. *Proximity* (dekat) yakni kejadian yang

³⁴ Eriyanto, *Ibid.*, hal. 104.

dekat dengan pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional. *Prominence* (ketenaran) yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. *Human Interest* (manusiawi) adalah kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut bagi orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa.³⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian dalam kultur ini memulai dari data yang ada di lapangan. Kerangka teori dan pemikiran tidak untuk diuji dan dijadikan sebagai batasan, melainkan lebih sebagai referensi bagi peneliti untuk berjalan. Teori dan kerangka pikir dalam penelitian ini akan terus-menerus dibangun selama proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka. Semua data dikumpulkan memungkinkan untuk dijadikan kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pemberitaan tentang insiden Monas yang dilaporkan oleh Harian *Kompas* dan *Republika* melalui suatu teori penelitian, yaitu teori pemingkakan berita.

³⁵ Mursito BM, *Penulisan Jurnalistik; Konsep Teknik dan Teknik Penulisan Berita*, (Surakarta, 1999), hal. 38-39.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap berita-berita seputar insiden Monas selama periode 2-8 Juni 2008. Berita-berita yang dipilih berasal dari dua media cetak yang dinilai berpengaruh, berkualitas serta bertaraf nasional. Mereka adalah *Kompas* dan *Republika*. Lokasi geografis diterbitkannya media tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini karena penekanannya ada pada taraf “nasional” yang dimiliki oleh kedua media itu.

Surat kabar harian menjadi media yang layak diperhitungkan untuk diteliti mengingat: Pertama, surat kabar harian adalah institusi sosial yang memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik. Kedua, surat kabar harian diyakini masih relevan didalam menjalankan peran *agenda setting* dimana agenda permasalahan publik yang dianggap penting oleh media di *blow-up* oleh media.

Secara singkat gambaran kedua media tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, harian *Kompas*. Harian ini mulanya diterbitkan oleh partai Katolik dan sejumlah jurnalis Katolik. Awalnya *Kompas* memperlihatkan kedekatannya dengan paratai Katolik. Ketika partai ini difusikan dengan PDI pada tahun 1973, *Kompas* berubah menjadi koran independen. *Kedua*, harian *Republika*. Harian ini didirikan atas inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Secara terbuka *Republika* mendefinisikan dirinya sebagai koran Islam, yang mencoba menghadirkan pemberitaan dalam perspektif Islami. Kedekatannya dengan ICMI

mempengaruhi karakter pemberitaan koran ini.

Tema berita mengenai “Insiden Monas” sengaja dipilih oleh peneliti karena peristiwa tersebut mendapat liputan yang signifikan dari media. Hal lain mengenai pemilihan rentang waktu pada 2-8 Juni 2008 dikarenakan pemberitaan tentang insiden Monas mulai bergulir pada 2 Juni 2008 dan mulai surut pada 8 Juni 2008. Selama rentang waktu itu pula, insiden Monas diberitakan secara *headline* oleh kedua media tersebut. Intinya, rentang waktu itu merupakan satu siklus pemberitaan mulai dari awal bergulirnya peristiwa hingga meredupnya pemberitaan tentang peristiwa tersebut.

3. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, apabila dilihat dari sumbernya, ada dua jenis data yang dapat digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Sedangkan, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi, peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai pemakai data.³⁶ Berkaitan dengan hal itu, sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita yang sesuai dengan persoalan yang diangkat penulis, yaitu

³⁶ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2006), hal. 125-1

teks berita yang berkaitan dengan insiden Monas pada Harian *Kompas* dan *Republika* periode 2-8 Juni 2008.

b. Data Sekunder

Sumber-sumber lain untuk melengkapi data penelitian dapat berwujud buku-buku referensi, koran, laporan/jurnal yang relevan dengan objek kajian, sumber berita lain di berbagai media dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terhadap teks berita ini bersifat kualitatif, oleh karena itu teks berita diambil sesuai dengan pertimbangan kebutuhan peneliti. Teks berita yang diambil hanya berita-berita yang terdapat pada halaman satu (halaman depan) saja. Tipe berita dibatasi pada berita langsung (*straight news*) yang berbentuk *hard news*. Pemilihan jenis berita ini karena berita pada halaman depan merupakan berita utama yang memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan kepentingan atau amat penting untuk segera diketahui pembaca dan biasanya berisi informasi peristiwa khusus yang terjadi secara tiba-tiba.

Teks berita yang dipilih berjumlah 6 judul berita dari harian *Kompas* dan 7 judul berita dari harian *Republika*. Sehingga total teks berita yang diambil dari dua media diperoleh 13 judul berita. Teks berita yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Sampel berita Harian *Kompas*:

1. Kebhinnekaan Dicederai; Setidaknya 12 Peserta AKKBB Terluka Akibat Kekerasan FPI (2 Juni)
 2. Negara Tidak Boleh Kalah; Rizieq Ditemui Polisi Berpakaian Sipil dari Polda Metro Jaya (3 Juni)
 3. Polda Beri Ultimatum; Potensi Konflik Horizontal Mulai Meluas (4 Juni)
 4. Ketua FPI Menjadi Tersangka; Kepala Polri: Munarman Masuk dalam DPO (5 Juni)
 5. DPR Memuji Langkah Pemerintah (5 Juni)
 6. Munarman Belum Serahkan Diri; 14 Orang Masih Diburu (6 Juni)
- b. Sampel berita Harian *Republika*:
1. Bentrokan Akibat Pemerintah Lamban (2 Juni)
 2. Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi; Ada Kecenderungan Pergeseran Isu Dari Pembubaran Ahmadiyah ke FPI (3 Juni)
 3. Akar Masalahnya Ahmadiyah; Pemerintah Dinilai Tidak Tegas Terhadap Ahmadiyah (4 Juni)
 4. Umat Islam Diminta Bersatu; Semua Pimpinan Ormas Diharapkan Menahan Diri (5 Juni)
 5. 14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi; Pemerintah Seharusnya Mencermati Akar Masalah (6 Juni)
 6. Ustadz Jefry: SBY Harus Adil; Deplu RI Minta Kedubes AS Tak Terlalu Banyak Komentar Insiden Monas (7 Juni)
 7. Ketua MPR Minta Pemerintah Berlaku Adil; Kalau Ada Yang Mau

Menambah Nabi, Itu Berarti Merusak Koridor Islam (8 Juni 2008)

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Pan Kosicki). Dalam model Pan Kosicki, struktur dan perangkat analisisnya relatif lengkap, sehingga memungkinkan peneliti melakukan kajian teks berita secara detail. Kelengkapan itu tampak dari perangkat yang digunakan, mulai dari skema berita, kelengkapan berita, detail nominalisasi, kata ganti, leksikon, sampai pada penekanan berita.

Bagi Pan dan Kosicki, analisis *framing* merupakan salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif. Sekalipun demikian, menurut Pan Kosicki, analisis *framing* agak berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam analisis isi kuantitatif.³⁷ Analisis *framing* dilihat sebagaimana wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegoisasikan.

Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi *framing* yang saling berkaitan. *Pertama*, konsepsi psikologi.

³⁷ Beberapa perbedaan itu menurut Pan dan Kosicki antara lain adalah *pertama*, analisis isi tradisional melihat teks berita sebagai hasil stimuli psikologis yang obyektif, dan karenanya maknanya dapat diidentifikasi dengan ukuran obyektif pula. Sebaliknya dalam analisis *framing*, teks berita dilihat dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai untuk mengkonstruksi memori khalayak. *Kedua*, analisis *framing* tidak melihat teks berita sebagai pesan yang hadir begitu saja seperti yang diandalkan dalam analisis isi tradisional. Sebaliknya, teks berita dilihat sebagai teks yang dibentuk lewat struktur dan formasi tertentu, melibatkan proses produksi dan konsumsi dari suatu teks. Ketiga, validitas dari analisis *framing* tidaklah diukur dari obyektifitas dari pembacaan peneliti atas teks berita. Lebih lanjut baca Eriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 251-252.

Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. *Kedua*, konsepsi sosiologis. *Framing* dalam konsepsi ini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya.

Bagi Pan dan Kosicki, *framing* pada dasarnya melibatkan dua konsepsi tersebut. Dalam media, *framing* dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak. *Framing* lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak.

Model analisis *framing* Pan dan Kosicki meliputi empat struktur, yaitu sintaksis, skrip atau naskah, tematik, dan retorik. Selengkapnya sebagai berikut:³⁸

a. Sintaksis

Dalam pengertian umum, sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Struktur sintaksis biasanya ditandai oleh struktur piramida terbalik mengacu pada pengorganisasian bagian-bagian struktur yang runtut, seperti *headline* (judul utama), *lead* (kepala berita atau pendahuluan), *episode* (runtutan cerita), *background* (latar belakang) dan *ending* atau *conclusion* (penutup) atau bagian yang

³⁸ Eriyanto, *Op. Cit.*, hal. 257-266.

umum saja, seperti *lead*, perangkat, tubuh dan penutup.

Dari struktur sintaksis pula kita dapat menganalisis objektivitas dan netralitas suatu pemberitaan media. Objektivitas pemberitaan media setidaknya memiliki tiga unsur pokok; unsur kebenaran, unsur keseimbangan serta relevansi judul dengan isi berita. Hal lain yang dapat dilihat dari struktur sintaksis adalah netralitas pemberitaan. Artinya ada komposisi seimbang antara narasumber; (1) yang pro dengan ide atau fakta yang diangkat, (2) yang kontra dengan tema berita yang disajikan dan (3) yang netral atau tidak berpihak.

b. Skrip

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita dan bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur skrip, pada umumnya terdiri dari: Siapa (*Who*), Apa (*What*), Kapan (*When*), Mengapa (*Why*) dan Bagaimana (*How*). Namun dalam penyajian wacana berita, beberapa unsur dibuat lebih menonjol.

Penonjolan unsur-unsur tertentu dari kelengkapan berita inilah yang akan memberi makna lain pada suatu berita. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita; bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu.

c. Tematik

Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana suatu fakta ditulis, meliputi; bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks secara keseluruhan. Struktur tematik ini membuktikan tema tertentu yang dipilih wartawan dalam melaporkan berita lewat susunan atau bentuk kalimat tertentu, proposisi atau hubungan antar proposisi.

Dalam suatu peristiwa, pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran pembaca berdasarkan definisinya atas realitas tersebut. Bagi Pan Kosicki, berita mirip pengujian hipotesis, peristiwa yang diungkapkan dan perangkat tersebut digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat.

Beberapa perangkat tematik adalah sebagai berikut:

- 1 Koherensi, yaitu menyangkut pertalian atau jalinan antar kata, proposisi, atau kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta berbeda dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seorang wartawan menghubungkannya. Ada beberapa macam koherensi. *Pertama*, koherensi sebab akibat, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai akibat atau sebab dari kalimat yang lain. Biasanya dihubungkan dengan kata penghubung 'sebab' atau 'karena'. *Kedua*, koherensi penjelas, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai penjelas dari kalimat lain. Biasanya dihubungkan dengan kata hubung 'dan' atau

‘lalu’. *Ketiga*, koherensi pembeda, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai lawan atau kebalikan dari kalimat lain. Biasanya dihubungkan dengan kata penghubung ‘dibandingkan’ atau ‘sedangkan’.

- 2 Kata ganti, yaitu menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana. Bertujuan untuk memanipulasi dengan menciptakan imajinasi.
- 3 Bentuk kalimat, yaitu hal yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Dengan kausalitas dalam bahasa diwujudkan dalam subjek dan predikat.
- 4 Detail, yaitu yang berhubungan dengan pengendalian informasi yang dikemukakan komunikator. Informasi yang menguntungkan diri komunikator akan ditampilkan lebih besar. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan mendapat porsi yang lebih sedikit atau dihilangkan sama sekali.

d. Retoris

Struktur retorik dalam wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan oleh wartawan. Berfungsi untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi-sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan pada suatu berita. Struktur retorik juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran.

Elemen struktur retorik yang digunakan adalah:

- 1 Leksikon: merupakan pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk menggambarkan peristiwa. Pilihan ini tidak dilakukan secara kebetulan, tetapi secara ideologis untuk menunjukkan pemaknaan seorang terhadap fakta.
- 2 Metafor: kiasan yang mempunyai persamaan sifat dengan benda atau hal yang bisa dinyatakan dengan kata atau frase. Dipakai tidak hanya untuk 'ornamen' berita, tetapi juga untuk mendukung dan menekankan pesan utama yang disampaikan.
- 3 Grafis: diwujudkan dalam bentuk variasi huruf (ukuran, warna dan efek), *caption*, grafik, gambar, tabel, foto dan data lainnya. Termasuk juga penempatan dan ukuran judul (dalam kolom). Elemen grafik memberikan efek kognitif dan menunjukkan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus difokuskan.
- 4 Gaya: menunjukkan pada kemasan bahasa tertentu dalam penyampaian pesan untuk menimbulkan efek tertentu pada khalayak.

Tabel 1.3
Kerangka *Framing* Menurut Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W+1H

TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	paragraf, proposisi
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafora 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/ foto, grafik.

Tabel 3: Diadopsi dari Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 176

Peneliti menggunakan empat dimensi struktural tersebut sebagai perangkat analisis dalam setiap berita mengenai insiden Monas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap teks berita *Kompas* dan *Republika* pada bab sebelumnya, peneliti melihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua media dalam memberitakan insiden Monas. Kedua media berusaha menampilkan pemberitaan sesuai dengan ideologi, karakter, dan kepentingan masing-masing.

Analisa tersebut menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama bisa dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah secara total. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat *frame* yang ditemukan dalam teks berita.

Dalam *frame Kompas*, Insiden Monas dimaknai sebagai aksi kekerasan yang mencederai kebhinekaan. Sikap *Kompas* terhadap peristiwa tersebut adalah menentang aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI terhadap massa AKKBB. Sikap *Kompas* ini ditunjukkan melalui pemberitaan yang menampilkan narasumber dari massa AKKBB dalam jumlah banyak yang dijelaskan dengan detail yang panjang, sedangkan narasumber dari FPI ditampilkan dalam jumlah minimal dengan detail yang pendek. Harian ini membangun kecenderungan pemberitaan yang menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan FPI telah mencederai kehidupan bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Kompas* menyajikan berita dengan tetap berpegang teguh

pada prinsip yang dimilikinya, yaitu humanisme trancedental.

Sementara itu, *Republika* memaknai insiden Monas sebagai masalah negara yang lamban menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Sikap *Republika* terhadap peristiwa tersebut ditampilkan dengan mengangkat sudut pandang dari penyebab terjadinya insiden Monas, yaitu Ahmadiyah. Hal itu dilakukan dengan menampilkan narasumber yang berasal dari tokoh agama dan ulama yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah. Harian ini membangun kecenderungan pemberitaan yang menekankan pada kritikan kepada pemerintah karena lamban menangani masalah Ahmadiyah dan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah. Dengan menampilkan narasumber yang dominan berasal dari tokoh agama dan penyajian fakta yang terkesan lebih membela FPI, serta menetapkan Ahmadiyah sebagai akar masalah, menunjukkan bahwa surat harian nasional *Republika* adalah korannya umat Islam yang memiliki prinsip berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil 'Alamin.

Masing-masing media, dalam hal ini *Kompas* dan *Republika*, mempunyai strategi pembentukan dan operasionalisasi wacana tersendiri dalam memframing insiden Monas. *Frame* tersebut menentukan bagaimana fakta diambil, siapa yang dijadikan narasumber, bagaimana berita ditulis, dan bagaimana berita ditempatkan dalam halaman surat kabar.

B. Saran-saran

Dari berita yang peneliti analisis, *Kompas* maupun *Republika* sebaiknya berimbang dalam menampilkan narasumber dari kedua pihak yang bertikai.

Hal ini penting, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam menyajikan berita.

Selain itu, dalam menampilkan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan konflik di masyarakat apalagi yang mengandung unsur agama dan melibatkan negara seperti halnya Insiden Monas, sebaiknya dapat berperan sebagai peredam konflik dan penawar solusi, bahkan dapat membantu negara menuntaskan permasalahan yang terjadi. Bukan semakin memperuncing masalah dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam memberitakan sebuah informasi atau peristiwa seperti insiden Monas, media sebaiknya menyajikan berita yang berimbang serta harus objektif tanpa mencampurkan fakta dan opini.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil' alamin, akhirnya selesai juga skripsi ini. Walaupun tidak mudah dan harus dilalui dengan berbagai kendala, halangan, dan rintangan yang selalu menyertai dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, namun penulis sangat bersyukur karena berkat pertolongan Allah dan bantuan orang-orang yang selalu setia membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta kontribusi pikiran, semua itu dapat dilalui penulis.

Penulis juga menyadari bahwa analisis *framing* terhadap sampel-sampel teks berita *Kompas* dan *Republika* dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini antara lain disebabkan karena **pertama**, analisis ini tidak meneliti jenis teks berita yang lain, seperti berita foto, *feature*, dan berita langsung yang lain. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini tidak ditujukan

untuk menggeneralisasi *frame* yang dibentuk *Kompas* dan *Republika*, serta kecenderungan berita secara keseluruhan. **Kedua**, Hasil analisis *framing* terhadap teks berita *Kompas* dan *Republika* dalam penelitian ini bersifat *transactionalist/ subjectivist*, artinya hasil atau temuan dalam penelitian ini merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Oleh karena itu dimungkinkan terjadi perbedaan hasil temuan peneliti satu dengan yang lain sekalipun meneliti teks yang sama. Kualitas penelitian dinilai berdasarkan sejauhmana peneliti dapat merekam dan merekonstruksi bagaimana realitas dipahami media, serta sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh pelaku sosial.¹³⁸

Akhirnya, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan sehingga tulisan ini tidak hanya berhenti sampai di sini tetapi tetap dalam kajian keilmuan yang tak pernah surut.

¹³⁸ Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*, LKIS, Yogyakarta, 2002, hlm. 62-63.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, J. 2001. *Menelaah Pemberitaan Sampit di Media Pers; Media Sekedar Memindahkan Arena Konflik?.* Jurnal Media Watch Kupas Vol. 3, No. 2
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Karya Abdi Tama
- Anwar, Rofiq. 2004. *Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya Terhadap Irak (Penelitian terhadap Teks Berita-Berita Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak dalam Media Kedaulatan Rakyat dan Bernas dengan Pendekatan Konstruksionis dan Metode Analisis Framing).* Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- BM, Mursito. 1999. *Penulisan Jurnalistik; Konsep Teknik dan Teknik Penulisan Berita.* Surakarta: Studi Pemberdayaan Komunikasi (Spikom)
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni.* Yogyakarta
- . 2002. *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.* Yogyakarta: LkiS
- Junaedhie, Kurniawan. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ngatmin, Marliana. 2007. *Analisis Framing Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Republika*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Profil Harian Repulika, Database Pusat Informasi Republika Jakarta
- Purwadi. 2007. *Media dan Wacana Solo Sebagai City Walk (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Wacana Solo sebagai City Walk pada Harian Umum Solopos dan Suara Merdeka Periode Maret-Juni 2006)*. Surakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret
- Rachmadi F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers; Analisis Dekriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia
- Santoso, F. A. 2005. *Sejarah, Organisasi, dan Visi Misi Kompas*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Sekilas Asal-usul AKKBB. Dokumentasi Pengurus AKKBB di Jakarta
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudibyo, Agus. 1999. *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- . 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS
- Suharto dan Tata Iryanto. 1989. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Penerbit Indah

Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS

Website:

Alam, Gigih Sari. *Sejarah Harian Kompas Sebagai Pers Partai Katolik*.

<http://gigihsarialam.blogspot.com/search?q=kompas>

http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Monas_Juni_2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/KOMPAS>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Republika>

<http://id.republika.co.id/profil>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kebhinnekaan Dicederai

Setidaknya 12 Peserta AKKBB Terluka Akibat Kekerasan FPI

Senin, 2 Juni 2008 | 03:00 WIB



KOMPAS/TIMBUKTU HARTHANA / [Kompas Images](#)

Ulama dan Kyai di Cirebon menyatakan sikap mengutuk keras peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok tak bertanggungjawab dalam kegiatan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas, Jakarta (1/6). Kyai Wawan Arwani dari Pesantren Buntet (tengah) didampingi KH Luthful Hakim dari Pesantren Nadwatul Ummah Buntet (kanan) dan Achmad Abduh Ketua Garda Bangsa Majalengka, di Pondok Pesantren Khatulistiwa Kempek, Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu sore.

Jakarta, Kompas - Kekerasan yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lain terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada peringatan hari kelahiran Pancasila, Minggu (1/6), di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, mencederai kehidupan kebangsaan di Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinnekaan.

Oleh karena itu, aksi kekerasan tersebut harus diusut oleh kepolisian dan pelakunya dikenai sanksi hukum.

Pendapat yang disuarakan oleh wartawan senior Goenawan Mohamad yang turut serta dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), juga disuarakan tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkena aksi kekerasan massa yang beratribut Front Pembela Islam (FPI). Antara lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga mantan Presiden, Abdurrahman Wahid, Ketua Dewan

Pertimbangan DPP PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Achmad Suaedi, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR A Effendy Choirie, dan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tindakan kekerasan yang dilakukan massa FPI itu dianggap ironis karena dilakukan terhadap anggota AKKBB pada peringatan hari kelahiran Pancasila yang seharusnya menjadi landasan pemersatu seluruh komponen bangsa.

Aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI itu mengakibatkan peringatan hari kelahiran Pancasila yang sedianya dilakukan AKKBB di kawasan Monumen Nasional (Monas) itu akhirnya bubar. Pada saat yang sama, dua kelompok massa, yaitu Front Perjuangan Rakyat dan Hizbut Tahrir Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, menuntut agar keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak dibatalkan.

Menanggapi aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI terhadap AKKBB, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, aksi kekerasan itu merupakan peristiwa yang memprihatinkan dan bertentangan dengan nilai Islam. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, tidak harus diselesaikan dengan main hakim sendiri. Sudah saat bangsa ini menghilangkan setiap aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam.

"Saya mengharapkan segenap pihak untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam kekerasan dan anarkisme," ujar Din.

Sementara Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga mantan Presiden, Abdurrahman Wahid, mengatakan, Islam menentang kekerasan. "Ini bukan negara rimba, mau tidak mau harus ditangkap orang-orang itu." Ia dalam kesempatan itu juga menyerukan agar Front Pembela Islam dibubarkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang tergabung dalam AKKBB Masruchah sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan FPI terhadap para peserta apel akbar AKKBB. "Kami diserang massa FPI yang membawa bambu dan botol, padahal sebagian besar dari kami terdiri dari perempuan dan anak-anak," katanya.

Masruchah mengimbau, seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan kekerasan dan mengedepankan diskusi dan perdebatan pemikiran yang sehat dalam menyelesaikan perselisihan.

Adapun Munarman, yang mengaku sebagai Komandan Laskar Islam mengatakan, pihaknya membubarkan aksi AKKBB dengan kekerasan karena AKKBB dianggap mendukung Ahmadiyah. Padahal, menurut Munarman, Ahmadiyah adalah organisasi kriminal.

Munarman juga menegaskan, "Mengapa mereka mengadakan aksi mendukung organisasi kriminal. Mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang."

Setidaknya 12 peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan FPI. Di antara yang terluka terdapat Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Syafii Anwar, Direktur Eksekutif The

Wahid Institute Achmad Suaedi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan KH Maman Imanul Haq Faqih dari Majalengka.

Polisi akan tindak

Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, Indonesia adalah negara hukum dan menjamin setiap warga Negara untuk menjalankan hak asasinya. Sebab itu, jika ada pelanggaran hukum seperti kekerasan, negara akan melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan secara hukum. Menurut dia, tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan akan dilakukan kepada siapa pun, tidak akan pandang bulu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira menegaskan, Polri akan menindak tegas siapa pun yang melakukan kekerasan. "Saya sudah bicara dengan Kepala Polres Metro Jakarta Pusat. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti merupakan rekaman video dari peristiwa kekerasan itu," katanya.

Kepala Polres Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Winarko mengemukakan, terpecahnya massa AKKBB, atau banyaknya anggota AKKBB yang keluar dari rute yang seharusnya dilalui, menjadikan pengawalan polisi terbagi, sehingga aksi kekerasan yang terjadi pada mereka tidak dapat dicegah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain mengatakan, "Jika pemerintah tidak segera membuktikan dapat bertindak tegas dengan memproses hukum para pelaku kekerasan, Ansor bersama elemen lain seperti Garda Bangsa akan membubarkan FPI."

Ia menambahkan, pihaknya sudah mulai lelah mendengar pemerintah yang berulang kali berjanji akan bertindak keras terhadap kelompok seperti FPI, tetapi nyaris tanpa bukti.

Aksi kekerasan tersebut membuat para ulama, kiai dan sejumlah organisasi mahasiswa mengadakan pertemuan mendadak di Pondok Pesantren Khatulistiwa, Kempek, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. (NOW/INU/JOS/USH/MAM/NMP/NIT/THT*/KSP/ECA/DMU)

Negara Tidak Boleh Kalah

Polisi Incar Lima Anggota FPI

Selasa, 3 Juni 2008 | 03:00 WIB



KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Rapat Koordinasi Polkam di Kantor Menko Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin (2/6). Rapat membahas aksi kekerasan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara yang berlandaskan hukum. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan.

“Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden dalam jumpa pers, Senin (2/6), di Kantor Presiden.

Untuk menyelesaikan masalah di antara komponen masyarakat, Presiden minta solusi damai sesuai aturan hukum dikedepankan, bukan dengan aksi kekerasan. Presiden juga minta Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan kinerja agar lebih siap, cepat dan profesional.

Selain itu, seluruh masyarakat diminta menjaga kehormatan bangsa. “Tindakan kekerasan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu, mencoreng

nama baik negara kita, di negeri sendiri maupun dunia. Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan seperti itu,” ujar Yudhoyono.

Disesalkan

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS dalam jumpa pers sesuai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden, mengatakan, pemerintah menyesalkan aksi kekerasan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Minggu lalu.

Untuk itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas pada siapa pun dan organisasi kemasyarakatan mana pun, yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas kejadian itu.

Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan, langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara hukum.

“Saya kira terkait konteks pembubaran ormas seperti itu akan terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri, terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya,” ujar Widodo.

Pemerintah akan mengkaji apakah ormas yang bersangkutan saat ini masih sesuai dengan ketika pertama kali didirikan. Jika tidak sesuai, langkah sanksi bisa diambil.

Saat ditanya bahwa bentrokan terjadi antara lain karena pemerintah tidak kunjung tegas, terutama terkait kejelasan Surat Keputusan Bersama tiga menteri terkait keberadaan ajaran dan jemaah Ahmadiyah, Widodo membantahnya.

Komando Laskar Islam

Panglima Komando Laskar Islam Munarman mengoreksi pemberitaan media yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dilakukan Front Pembela Islam. menurut dia, itu dilakukan Komando Laskar Islam.

“Saya katakan bahwa yang kemarin mendatangi Monas adalah Komando Laskar Islam yang merupakan gabungan dari laskar-laskar seluruh Indonesia,” ujarnya di Markas Front Pembela Islam di Jakarta, Senin.

Menurut Munarman, Aliansi Kebangsaan itu merupakan aksi kelompok pendukung Ahmadiyah dan bukan untuk peringatan hari Pancasila. Bahkan, ada spanduk yang berisi tulisan menolak SKB Ahmadiyah.

“Kita tidak bisa dibohongi, karena sudah menyusupkan dua orang di tengah-tengah mereka, dan terbukti mereka melakukan provokasi,” ujar Munarman yang antara lain didampingi Habib Rieziq dari FPI, Ketua Umum Hizbuth Tahrir KH Muhammad Al Khaththath, Ahmad Michdan dari Tim Pembela Muslim, dan Ketua Forum Umat Islam Mashadi.

“Kami juga mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan bahwa kami menganiaya wanita, anak-anak, dan orang cacat. Itu sama sekali tidak benar, fitnah belaka!” ujar Munarman.

Michdan mengatakan, TPM dengan tegas meminta presiden untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Jika dalam waktu tiga hari tidak keluar keputusan presiden untuk membubarkan Ahmadiyah, TPM akan melakukan gugatan terhadap presiden.

Habib Rieziq bahkan mengeluarkan perintah pada seluruh laskar Islam untuk siaga perang terhadap Ahmadiyah. Itu sebabnya, ia kembali meminta pada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah dalam waktu tiga hari.

Sebelumnya, Mashadi memperlihatkan video yang isinya seorang peserta aksi yang diduga kelompok aliansi, akan mengeluarkan senjata. Namun, tak tampak jelas bentuknya.

Kriminalitas

Sampai kemarin kecaman terhadap aksi kekerasan terus mengalir. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang diterima Presiden, menilai aksi kekerasan di Monas adalah kriminalitas nyata di mana negara dituntut lebih berani dan tegas. “Kita tidak ingin Indonesia terjebak dalam kekerasan yang hanya akan menghancurkan kehidupan bersama kita sebagai bangsa yang majemuk berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Ketua DPR Agung Laksono juga mengutuk kekerasan atas elemen AKKBB, yang dinilainya tidak bermoral dan tidak berjiwa Pancasila.

Ia meminta polisi secepatnya bertindak agar kekerasan semacam itu tidak meluas.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan, aparat kepolisian tidak takut menangkap anggota FPI yang diduga menyerang anggota AKKBB.

Bambang menyebut polisi sudah mengincar lima orang anggota FPI yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. “Masak (polisi) takut. Enggak ada takut... Kita kan menegakkan hukum,” ujarnya.

Bambang menambahkan, tidak tertutup kemungkinan para pimpinan organisasi juga akan dicitrak oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. "Siapa yang ada dibelakangnya (di belakang kelima tersangka), tentunya dari hasil pemeriksaan bisa kita kembangkan."

Senin siang, AKKBB dan sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pidana yang dilakukan anggota FPI. Para tokoh itu di antaranya, Asmara Nababan, Garin Nugroho, Arbi Sanit, Hendaridi, MM Billah, dan Effendi Choiri. "Kami mendesak kepolisian mengambil tindakan tegas atas kejahatan ini. Kami tekankan, pertanggungjawaban yang kami tuntut adalah termasuk pertanggungjawaban organisasi," kata Asmara.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membantah bahwa polisi telah melakukan pembiaran. "Tidak ada pembiaran. Polisi sudah berusaha mengamankan berbagai kegiatan unjuk rasa hari itu," kata Abubakar.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris besar Budi Winarso mengatakan, Senin ini pihaknya masih melakukan pemanggilan. "Kalau tidak ada tanggapan akan ditindak tegas besok (Selasa)," ujarnya. (DWA/INU/HAR/DIK/ MAM/SF/KSP/ONG)

Polda Beri Ultimatum

Potensi Konflik Horizontal Mulai Meluas

Rabu, 4 Juni 2008 | 02:02 WIB

Jakarta, Kompas - Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Adang Firman memberi ultimatum kepada para tersangka anggota Front Pembela Islam untuk menyerahkan diri secepatnya.

Polisi memberi waktu penyerahan diri itu hingga pukul 00.00. Jika tidak, polisi akan menangkap langsung.

“Saya Kepala Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran memberikan waktu sampai dengan malam ini kepada yang bersangkutan (para tersangka) untuk segera menyerahkan diri kepada kepolisian. Kalau sampai dengan malam ini yang bersangkutan masih belum menyerahkan diri kepada kepolisian, saya terpaksa akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Adang, dalam jumpa pers di kantor Polda Metro Jaya, Selasa (3/6) malam.

Ditanya mengapa polisi tidak langsung menangkap, Adang menjelaskan, hal itu karena pernyataan dari pimpinan FPI menyatakan bahwa para anak buahnya akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di Monas. “Jadi kita masih baik hati. Saya kira, hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh kepolisian,” ujarnya.

Adang menambahkan, langkah persuasif tersebut dilakukan juga untuk mengurangi kemungkinan eksekusi di lapangan yang dapat mengorbankan warga.

Pangdam Jaya Mayjen J Suryo Prabowo secara terpisah mengatakan, siap membantu Polda Metro Jaya untuk mengamankan Kota Jakarta, jika ada permintaan dari Polri. “Mengamankan Kota Jakarta bukan tugas utama TNI AD. Namun, jika ada permintaan dari Polda agar Kodam Jaya membantu pengamanan, kami siap menerjunkan pasukan membantu polisi,” kata Suryo Prabowo menjawab pers di Markas Kodam Jaya.

Hingga pukul 23.30, ratusan orang masih berkumpul di sekitar rumah Habib Rizieq Shihab. Konsentrasi massa terbagi di dua titik, yaitu di Gang Paksi yang menuju rumah Habib. Jalan masuk menuju gang itu dipalang dengan dua bilah bambu dan dijaga sekitar delapan orang.

Titik kedua, di Jalan Petamburan III, digelar terpal dan sekitar 200 anggota laskar duduk di sana.

Laporkan AKKBB

Selasa kemarin, Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab, bersama tim pengacara dari Tim Pembela Muslim dan sejumlah pengurus kelompok massa Islam, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jakarta Raya. FPI melaporkan 289 orang yang nama-namanya tercantum dalam iklan AKKBB yang dinilai sebagai aktor intelektual insiden Monas.

Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath yang membacakan dasar laporan FPI itu, menyatakan, aksi AKKBB di kawasan Monas itu adalah aksi ilegal karena tanpa izin.

Dari nama-nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jakarta Raya itu, Habib Rizieq menyebut sejumlah nama, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Amien Rais.

Dengan pelaporan itu, kata Habib Rizieq, FPI sudah menyerahkan penanganan insiden Monas itu ke polisi. Habib Rizieq meminta polisi untuk bersikap obyektif dan tidak bersikap diskriminatif dalam menangani kasus itu.

Ketika ditanya apakah Panglima Komando Laskar Islam Munarman mau menyerahkan diri ke polisi, Habib Rizieq menyatakan, Munarman siap menyerahkan diri apabila polisi tidak bertindak diskriminatif.

Tuntut ketegasan

Tuntutan agar pemerintah segera bersikap tegas dengan menindak para pelaku kekerasan, semakin menguat. Di saat bersamaan, potensi konflik horizontal mulai meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat kemarin menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara, agar tidak hanya mengecam kekerasan di Monas, tapi menindak semua orang yang bertindak anarkis.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nadrah Izahari menyatakan hal itu saat mendampingi Wakil Ketua Komisi III Suropto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menerima Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan dan Premanisme Berbasis Agama, Selasa.

“Bukan hanya ucapan yang kita harapkan dari SBY, tapi action untuk menindak para pelaku kekerasan,” ujarnya.

Di Jember, Jawa Timur, FPI kemarin menyatakan membubarkan diri, setelah ratusan orang dari Satgas Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerakan Pemuda

Ansor dengan kawalan polisi mendatangi markas FPI di Kampung Kauman, Kelurahan Mangli, Jember, Jawa Timur.

Ketua FPI Jember Habib Abu Bakar menyatakan, pihaknya tidak sependapat dengan perbuatan anggota FPI di Jakarta yang bertindak anarkis. "Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut, dan tidak setuju melakukan tindak kekerasan terhadap sesama hamba Allah. Sungguh saya menyesal dengan kejadian itu," katanya.

Elemen-elemen organisasi massa di bawah NU Jatim, juga menyerukan pembubaran FPI. Aliansi Masyarakat Cinta Damai Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta agar FPI dibubarkan.

Di Banyumas, massa dari Aliansi Masyarakat Pecinta Merah Putih Banyumas dan Lembaga Independen Banyumas (Libas) menuntut agar DPRD Banyumas ikut mendukung untuk menghentikan kekerasan, sekaligus membubarkan FPI.

Di Majalengka, Jawa Barat, sejumlah ulama, pemuda, dan warga yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Majalengka berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Majalengka, menuntut agar FPI ditindak tegas. KH Ahmad Bunyamin Buchori, ulama Majalengka, menilai, aksi kekerasan di Monas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila.

Sedangkan Forum Masyarakat Beragama untuk Bangsa Jawa Tengah mendesak aparat hukum menindak tegas pelaku kekerasan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Sekitar 50 anggota Formusa berorasi di Jalan Pahlawan, Semarang.

Di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, mengimbau semua kelompok masyarakat tidak melakukan aksi anarkis dengan alasan apa pun. "Jangan ada aksi balas dendam antarkelompok masyarakat yang membuat masyarakat tidak tenang," katanya.

Dialog

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Zannuba Arifah Chafsoh, akrab dipanggil Yenny Wahid, semalam memastikan seluruh pendukung dan pecinta Abdurrahman Wahid sepakat menggelar aksi mendatangi langsung para pengikut Front Pembela Islam (FPI) di seluruh daerah di Indonesia untuk kemudian diajak berdialog.

Langkah itu, menurut Yenny, untuk menyalurkan protes para pengikut Abdurrahman Wahid yang keberatan dengan pernyataan pemimpin FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab yang dianggap telah menghina.

Yenny menambahkan, pihaknya menjamin tidak akan ada bentrokan fisik dengan para pendukung FPI karena dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disepakati kedatangan mereka nanti dilakukan secara damai dan tanpa ada seorang pun diperbolehkan melukai siapa pun sesuai koridor aksi yang telah disepakati dan ditetapkan.

Secara terpisah, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, meminta agar Nahdlatul Ulama jangan diumpankan untuk bentrok fisik dengan kelompok mana pun. Pelibatan organisasi NU justru dapat memicu kekerasan lain yang lebih panjang dan lebih merugikan.

“Semua keputusan PBNU tentang masalah akidah (dasar-dasar beragama) maupun syariah (hukum), hanya dapat dikeluarkan melalui rapat gabungan antara Dewan Tanfidziah dan Dewan Syariah PBNU. Tidak boleh ada seorang pun yang berwacana sendiri dengan membawa-bawa nama NU,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Hasyim, PBNU meminta kepada seluruh warga NU untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. (SUT/DWA/MZW/CAS/A03/MDN/YOP/A06/WER/A11/RWN/A15/THT/INA/A14/CHE/SIR/COK/KSP/SF/GAL)

Ketua FPI Menjadi Tersangka

Kepala Polri: Munarman Masuk dalam DPO

Kamis, 5 Juni 2008 | 02:14 WIB



KOMPAS/ANTONY LEE / Kompas Images

Personel gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya memeriksa rumah-rumah penduduk di sekitar markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Pemeriksaan dilakukan untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana terkait insiden Monas. Polisi juga membawa Ketua FPI Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya.

Jakarta, Kompas - Pasca-penangkapan terhadap 59 anggota Front Pembela Islam di markasnya, Rabu (7/6) pagi, kepolisian menetapkan Ketua FPI Rizieq Shihab sebagai tersangka terkait insiden di Monas, Minggu (4/6).

Rizieq diduga menyembunyikan dan melindungi para tersangka anggota FPI yang diburu polisi. Sementara ini, Rizieq tidak ditahan karena sangkaan pidana tersebut hanya dijera ancaman penjara di bawah lima tahun.

Rizieq sejauh ini hanya dijera Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan pidana melindungi dan menyembunyikan sejumlah pelaku tindak kejahatan. Perbuatan itu diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Rabu (4/6) petang.

Abubakar menambahkan, sementara ini, polisi menetapkan 20 anggota FPI sebagai tersangka dalam peristiwa insiden di Monas yang membawa sejumlah korban luka dari massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB.

Sementara, Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan, Panglima Komando Laskar Islam Munarman, yang belum berhasil ditangkap polisi, hingga kini masih dinyatakan sebagai buron dalam Daftar Pencarian Orang. Sementara, selama beberapa hari terakhir sebelumnya, Munarman justru mengadakan jumpa pers di markas FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat.

Ditanya pers, mengapa Munarman tidak segera ditangkap sejak diketahui masih di Petamburan, Sutanto malah balik bertanya, "Yang di mana yang ketemu?" ujar Sutanto se usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana.

Koordinator Operasional Tim Pengacara Muslim (TPM), Achmad Michdan menyatakan barisan pengacara disiapkan untuk mendampingi para Laskar FPI yang diperiksa kepolisian.

Michdan mengklaim sudah ada 70 orang pengacara yang akan bergabung dengan Advokasi Anti Ahmadiyah, barisan pengacara yang dibentuk TPM terkait Insiden Monas.

"Kami dari TPM, BH FPI (Badan Hukum Front Pembela Islam), dan berbagai kalangan advokat sudah siap," kata Michdan. Dia menambahkan, jumlah pengacara yang akan bergabung dengan mereka akan bertambah.

Pasukan Besar

Kepolisian mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menangkap 59 anggota FPI Rabu pagi. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Winarko mengatakan, terdapat 800 personil polisi yang dikerahkan. Proses penangkapan berlangsung mulus tanpa perlawanan dari FPI.

"Mereka polisi gabungan dari banyak kesatuan dari Polres Metro Jakarta Pusat, Detasemen Khusus 88 Antiteror, dan Polda Metro Jaya," kata Heru.

Munarman

Mahendra Datta, anggota tim pengacara yang dihubungi Rabu malam mengaku, Munarman sebelum menghilang sempat menyampaikan kepadanya, dia tidak mau ditangkap.

"Dia tidak mau ditangkap karena dia tahu, kasus ini telah dipolitisasi. Dia akan sukarela menyerahkan diri kalau Ahmadiyah dibubarkan," ujar Mahendra Datta.

Pada Rabu siang pukul 12.00, beberapa anggota Polda Metro Jaya kembali mendatangi markas FPI di Petamburan. Mereka langsung masuk ke rumah Rizieq dan ditemui kuasa hukum FPI.

Salah satu tim pengacara FPI, As'ad Yusuf mengatakan, kedatangan para polisi tak berseragam tersebut untuk mencari Munarman, Panglima Komando Laskar Islam. Mereka turut mendukung usaha Polda Metro Jaya dan sukarela memberikan beberapa dokumen yang mungkin bisa membantu polisi dalam menemukan Munarman.

Achmad Michdan juga mengaku hingga Rabu petang kemarin belum dapat berkomunikasi dengan Munarman. Michdan mengaku sudah menghubungi sejumlah orang yang diperkirakan mengetahui keberadaan Munarman tetapi belum menemukan titik terang.

Michdan membenarkan bahwa dirinya pernah diminta Munarman untuk mendampingi Munarman.

Kronologi Penangkapan

Sejak Selasa (3/6) malam, setelah pada pukul 20.00 WIB Kepala Polda Metro Jaya mengultimatum FPI di kantor Polda, suasana di sekitar markas FPI nampak tegang dan dipenuhi sekitar 200 warga. Para anggota FPI menjaga ketat seputar markas mereka, mulai dari gang masuk menuju petamburan III. Mereka juga sempat memasang barikade kawat berduri.

Menjelang tengah malam atau batas waktu akhir yang diultimatum Kepala Polda Metro, sejumlah reserse polisi dari berbagai kesatuan tampak mulai meninggalkan kantor Polda Metro Jaya secara terpisah dengan sejumlah mobil lalu menuju kawasan Petamburan. Konsolidasi tim kepolisian berlangsung intensif sejak menjelang tengah malam. Lewat tengah malam itu, tim kecil polisi juga intensif melakukan negosiasi damai dengan FPI.

Pukul 06.30, beberapa menit setelah polisi memblokir Jalan KS Tubun, 800 anggota pasukan anti huru-hara dari unsur Brigade Mobil dan Detasemen Khusus Anti Teror 88, tiba depan Halte Bethel. Di bawah arahan Kepala Satuan Resimen Mobil, Ajun Komisaris Besar RC Gumay, Kepala Satuan Keamanan Negara, Ajun Komisaris Besar Tornagogo Sihombing, dan Kepala Satuan Kendaraan Bermotor Ajun Komisaris Besar Nico Afinta, polisi bergerak ke Markas FPI.

Sempat terjadi negosiasi singkat antara Kepala Polres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa. Mereka mengizinkan polisi menemui Rizieq di markas FPI. Ketika melakukan penyisiran, polisi menyita sejumlah potongan bambu, senjata tajam, dan ketapel.

Rizieq yang mendampingi Kepala Polres Jakarta Pusat meminta anggota FPI untuk tidak menghalangi tugas polisi yang sedang mencari orang-orang yang diduga terlibat insiden Monas.

"Aktivis FPI pada saat pencarian tolong jangan ada yang halangi. Ini merupakan tugas rutin. Tunjukkan kita berani berbuat, berani bertanggung jawab," kata Rizieq.

Polisi lalu mengajak Rizieq ikut serta ke Polda. Rizieq sempat berujar kepergiannya ke Polda ini merupakan inisiatifnya. "Saya ke Polda untuk mendampingi mereka selama proses pemeriksaan. Jangan terprovokasi," kata Rizieq yang menumpang mobil Nissan Terano biru B 1103 T. (GAL/HAR/COK/WIN/NEL/SF/MAS)



Kasus Monas

DPR Memuji Langkah Pemerintah

Kamis, 5 Juni 2008 | 02:08 WIB

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat memuji langkah pemerintah yang akhirnya menangkap para pelaku penyerangan dalam insiden Monas pekan lalu.

“Langkah yang diambil Presiden bagus. Meskipun agak sedikit terlambat, tapi bagus,” ucap Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR Effendy Choirie, Rabu (4/6).

Menurut Choirie, sikap Presiden untuk menegakkan negara hukum ini akan meningkatkan citra Yudhoyono di mata rakyat. F-KB juga akan mendukung sikap pemerintah yang menegakkan hukum. “Kita akan dukung. Pemerintah tidak perlu takut dengan pelaku kekerasan berkedok agama,” ujarnya.

Lebih jauh, Choirie juga mengharapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelidiki lebih dalam aktor intelektualis penyerangan tersebut.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung berharap pemerintah segera menertibkan simbolisasi laskar-laskar yang sebenarnya tidak perlu karena hanya memancing terjadinya bentrokan.

“Dalam UU Ormas (UU Nomor 8/1985) sebenarnya sudah diatur apa yang boleh dan tidak. Namun, ketika dalam pelaksanaannya diberi improvisasi, akhirnya menjadi ke mana-mana. Padahal, pemerintah punya wewenang penuh untuk mengatur hal-hal tentang ormas,” kata Anung.

Satuan tugas yang dimiliki partai politik, lanjut dia, juga tidak dapat lagi menjadi paramiliter seperti waktu-waktu sebelumnya. Tugas satgas hanya mengamankan kegiatan partai.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menambahkan, penertiban laskar seharusnya segera dilakukan karena Indonesia sudah punya berbagai pengalaman buruk atas keberadaannya.

“Yang terjadi di Monas pekan lalu hanya salah satunya. Keberadaan laskar di Timor Timur menjelang diadakannya penentuan pendapat di daerah itu pada 1999, juga menjadi pelajaran yang tidak kalah pahitnya karena membuat kita menjadi sasaran kecaman dunia internasional,” ucapnya.

Penertiban laskar, lanjut Hendardi, juga perlu dilakukan untuk mengamankan Pemilu 2009 sebab pengalaman menunjukkan, laskar-laskar itu rentan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat sejumlah pihak dalam pemilu.

Surat teguran

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengirimkan surat teguran kepada Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Kedua surat itu dilayangkan pada 3 Juni.

Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, surat teguran itu mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan turunannya. Teguran itu, menurut Saut, diberikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di Monas, 1 Juni lalu.

Surat teguran untuk FPI dilayangkan karena penyerangan dan penganiayaan oleh massa FPI terhadap massa AKKBB, yang dinilai sebagai tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Dalam surat itu disebutkan, Pasal 13 UU No 8/1985 menyatakan, organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dibekukan kepengurusannya.

Dalam surat kepada AKKBB bernomor 220/613. Set disebutkan, berdasarkan penelitian, AKKBB belum memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah. Aturan itu sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mendagri Nomor 5/1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Ormas, bahwa setiap ormas wajib memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah.

“Dilihat dari segi aktivitasnya, AKKBB merupakan ormas dan keberadaan AKKBB ini belum terdaftar,” kata Saut.

Kriminalitas biasa

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto menilai insiden kekerasan massa FPI di Monas hanyalah tindak kriminal biasa.

Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak perlu bingung dan sejak awal bisa langsung menanganinya mengingat aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan sudah jelas.

“Jadi, tinggal dilihat, kejadiannya seperti apa dan aturan hukumnya bagaimana. Langsung diterapkan saja. Pemerintah tidak boleh hanya bersikap menyesalkan atau mengecam, melainkan harus cepat bertindak sehingga ada kejelasan,” ujar Wiranto dalam diskusi kepemimpinan di The Arya Suta Center.

Selain itu, Wiranto juga meminta kasus tersebut jangan sampai diperumit dan malah dibelokkan menjadi persoalan politik, apalagi agama. Jika kedua hal itu dilakukan, yang muncul kemudian hanyalah keragu-raguan.

“Apa yang dilakukan FPI kemarin sudah masuk kategori kriminal dan melanggar hukum. Negara ini negara hukum. Kalau hukum ditegakkan, negeri ini akan aman dan tertib. Namun, jika bisa ditawar-tawar, aspek hukum akan menjadi dipinggirkan,” ujar Wiranto.

Bukan alihkan isu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menyangkal bahwa isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah dialihkan ke isu lain.

Menurut Anas, isu kenaikan harga BBM tidak perlu dialihkan. Kontroversi dan debat publik tentang kenaikan harga BBM justru berguna untuk memberikan informasi yang luas dan berimbang kepada masyarakat.

Karena itu, adanya analisis dan tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah tentang upaya pengalihan isu penolakan kenaikan harga BBM dengan isu penanganan kekerasan di Monas, Minggu lalu, adalah analisis yang dipaksakan dan tuduhan yang menggelikan.

“Analisis dan tuduhan itu adalah buah dari jalan pikiran negatif,” kata Anas.

Anas juga meminta agar dukungan diberikan kepada aparat yang menangani kasus Monas dan jangan lagi dipecah fokus untuk penindakannya. “Segera proses dan adili para pelaku kekerasan. Tidak elok kalau dikaburkan dan dibelokkan dengan isu kepentingan pengalihan isu kenaikan harga BBM,” ujarnya. (SUT/INU/SIE/DWA/NWO)

Munarman Belum Serahkan Diri

14 Orang Masih Diburu

Jumat, 6 Juni 2008 | 03:00 WIB



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images

Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) berjalan menuju mobil dari ruang perawatan tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta, saat pembebasan mereka, Kamis (5/6). Hari itu sebanyak 52 anggota FPI dibebaskan setelah tidak cukup bukti terlibat penyerangan peserta aksi dari AKKBB di Monas, Minggu lalu.

BOGOR, KOMPAS - Sampai Jumat (6/6) pukul 01.05, Munarman belum menyerahkan diri. Padahal, sebelumnya disebutkan bahwa Munarman akan menemui pengacaranya, Samsul Basri Rajam, dan Anton Medan, kerabatnya, dan kemudian menyerahkan diri kepada polisi.

“Dalam kontak terakhir Munarman dengan Samsul Basri pada pukul 18.00, Munarman menyebutkan akan menemui kami pada pukul 22.00 untuk kemudian ia kami antar ke rekan saya di Mabes Polri. Janji bertemunya, ya, di sini ini,” kata Anton Medan sekitar pukul 23.00 di tempat peristirahatan bagi pengendara mobil di Sentul, Tol Jagorawi arah Jakarta.

Anton mengungkapkan hal itu setelah ia dan Samsul Basri tiba-tiba mendapat kabar bahwa sudah ada pihak lain yang lebih dulu menemui Munarman di Sentul City.

Anton dan Samsul, beserta belasan wartawan, segera bergerak ke arah Sentul City, tetapi keduanya belum dapat bertemu dengan Munarman.

Sudah 7 ditahan

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Kamis, mengatakan, polisi masih memburu 14 buronan yang masuk daftar pencarian orang terkait insiden Monas.

Sampai saat ini, dari 59 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang ditangkap polisi, Rabu lalu, empat di antaranya dibebaskan karena usianya dikategorikan anak-anak. Polisi kemudian membebaskan lagi 48 anggota FPI lainnya, yang disimpulkan tidak terlibat dalam insiden Monas.

Dengan demikian, kepolisian baru menahan tujuh tersangka anggota FPI, termasuk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab. Enam orang lainnya yang ditahan adalah Agus Bambang, Sudiran bin Sobari, Raplin, Fahrul Rozi, Taufik Hidayat, dan Samsuddin.

Rizieq Shihab dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan penghinaan terhadap suatu golongan, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan berbuat kekerasan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan tersangka kejahatan. Semua pasal tersebut menjerat tersangka dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun.

Abubakar juga mengatakan, polisi kini tengah menyelidiki orang yang terlihat membawa senjata api dalam peristiwa di Monas itu.

Penggerebekan

Kepala Satuan Reserse Kriminal Jakarta Barat Komisaris Suyudi Ario Seto menjelaskan, ia dan sejumlah anggotanya, Kamis pukul 05.30, menggerebek tujuh lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal dan atau tempat persembunyian anggota FPI yang diduga terlibat penyerangan di kawasan Monas.

Dari tujuh lokasi di kawasan Cengkareng tersebut, polisi menangkap 13 anggota FPI dan membawa mereka ke Markas Polres Metro Jakbar. Setelah diperiksa, 10 di antaranya mengaku terlibat kasus Monas. Suyudi mengakui bahwa tiga anggota FPI lainnya lolos dan lari ketika digerebek. "Ketiga orang yang sekarang buron itu sudah diketahui identitas lengkapnya. Mereka adalah AL, AC, dan YL. Saya mengingatkan mereka agar menyerahkan diri," ujarnya.

Terkait mulai maraknya berbagai aksi anti-FPI di berbagai daerah di Indonesia pasca-insiden Monas, Abubakar Nataprawira mengingatkan, aksi balasan terhadap para anggota FPI, jika mengarah ke tindak kekerasan, juga merupakan praktik kriminal.

Lembut dan simpatik

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan, kekerasan horizontal yang dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan akan meluas ke seluruh penjuru Tanah Air.

“PPP mengajak Habib Rizieq mengubah metode perjuangan yang selama ini kita kenal ada unsur-unsur kekerasan bisa diubah menjadi metode yang lembut dan simpatik,” kata Suryadharma se usai menjenguk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya, Kamis.

Suryadharma yang berkunjung bersama Wakil Ketua Majelis Syariah PPP Nur M Iskandar juga menyatakan, setelah mengunjungi Ketua FPI, pihaknya juga akan berkunjung ke penganut Ahmadiyah. Para ulama akan diikutsertakan untuk memberikan pengajaran tentang ajaran Islam yang benar.

Kemarin malam, sejumlah ulama yang menamakan diri Forum Ukhuwah dan Marhamah meminta pemerintah segera membubarkan Jemaat Ahmadiyah. Mereka juga mengingatkan umat Islam agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniyah.

Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ustadz Jefri al Bukhori di kompleks Masjid Pondok Indah, Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu antara lain juru bicara Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Ketua HTI Muhammad Al Khaththath, Ketua Forum Umat Islam Mashadi, serta para habib.

Apresiasi

Sejumlah penggiat HAM dan tokoh lintas agama kemarin menyampaikan apresiasi terhadap tindakan kepolisian. “Saya berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menangkap mereka dan akan lebih berterima kasih lagi jika pemerintah mau membubarkan FPI,” kata mantan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta, Kamis.

Aksi yang dilakukan sebagian warga Nahdlatul Ulama untuk membubarkan FPI di berbagai daerah dibantah Wahid sebagai tindak kekerasan. Wahid sebagai tokoh NU tidak pernah menyuruh mereka untuk berlaku anarki. (MAM/ SUT/ MZW/ OSA/ HAR/ SF/ NEL/ WIN/ RTS)

Bentrokan Akibat Pemerintah Lamban

Senin, 02 Juni 2008

JAKARTA Republika—Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) dengan Front Pembela Islam (FPI) dinilai merupakan buntut dari kelambanan pemerintah menangani masalah Ahmadiyah. "Itulah akibatnya kalau pemerintah lama," kata Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Hamdan Zoelva, di Jakarta, Ahad (1/6).

Hamdan mengatakan banyak pihak sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidakcepatan dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah bisa mengakibatkan bentrokan. Hamdan mengaku khawatir bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. "Ini bisa makin panas," katanya.

Jika pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang Penghentian Kegiatan Ahmadiyah, Hamdan menilai bentrokan tak akan terjadi. Situasi menggantung dinilainya bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat. Jadi, "Sekarang, saatnya ambil keputusan," tandas Hamdan.

Kuasa hukum Forum Umat Islam, Munarman, menilai bentrokan terjadi karena langkah tegas soal Ahmadiyah tak kunjung diterapkan. Langkah pemerintah yang superhati-hati dinilainya membuat situasi masyarakat tak menentu. "Itu artinya pemerintah mempersilakan mengambil tindakan sendiri. Itu kita ambil. Ini bahasa politiknya," kata mantan ketua YLBHI itu.

Potensi bentrok semakin terbuka, kata Munarman, karena yang berdemonstrasi mendukung Ahmadiyah—seperti yang kemarin terjadi di Monumen Nasional (Monas)—bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. Mereka, kata Munarman, bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir. "Di situ marahnya umat," kata Munarman.

Bentrokan di Monas kemarin terjadi setelah acara makan mi massal bubar. Tak diketahui pasti apa pemicu bentrokan itu. Salah seorang pendemo dari AKKB, Yudhi, mengatakan sebanyak 12 orang massa AKKB terluka akibat peristiwa itu. Adapun massa dari AKKB lainnya berlari tunggang-langgang. "Polisi geraknya lamban," Yudhi menyayangkan.

Tapi, Kepala Polres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Winarko, justru menyalahkan massa AKKB. Peralnya, mereka mulanya hanya berencana berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi, "Ternyata, mereka menuju Monas juga. Massa AKKB belum melakukan koordinasi dengan kami untuk berdemonstrasi di Monas," sesalnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammadiyah menyayangkan tindakan kekerasan dan provokasi dala kasus itu. Umat agama lain diminta jangan ikut campur masalah Ahmadiyah," kata ketua MUI Amidhan. [evy/c68/ant](#)

Masyarakat Diimbau tak Lakukan Provokasi

Ada kecenderungan pergeseran isu dari pembubaran Ahmadiyah ke FPI.

Selasa, 03 Juni 2008

JAKARTA Republika– Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memancing terjadinya kekacauan baru. Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Monumen Nasional (Monas), Ahad (1/6) lalu, diharapkan tak meluas dan mengundang reaksi yang tidak perlu.

"AKKBB harus mawas diri, menghentikan provokasi, dan kemudian jajaran NU, Muhammadiyah, sampai ke daerah. Begitu juga dengan FPI, tidak usah terprovokasi, ini bahaya benar," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Senin (2/6).

Perubahan demokrasi sepuluh tahun terakhir membutuhkan kearifan dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi. "Jadi, kalau mengekspresikan kebebasan yang provokatif, itu juga mengundang reaksi yang tidak perlu," katanya.

Salah satu penyebab yang melatari konflik antarumat beragama karena terlalu menggebu-gebu mengekspresikan kebebasan. Untuk itu, Jimly mengimbau pemerintah tidak terbawa arus menentukan mana pihak yang benar dan mana yang salah.

Biarkan, katanya, konflik diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk tuntutan pembubaran FPI. Aparat hukum dapat mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah melindungi segenap warga sebaik-baiknya. "Kalau yang mau dibubarkan itu parpol, tempatnya di MK. Tapi, kalau ormas, di pengadilan biasa."

Jimly khawatir, jika peristiwa di Monas terus berkembang, akan terjadi adu domba dalam tubuh umat beragama. Padahal, persoalan internal umat beragama dapat diselesaikan dengan dialog.

Dia mencontohkan masalah Ahmadiyah yang disebutnya rumit karena tak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, tapi tetap mengklaim sebagai Islam. "Biarlah umat beragama itu sendiri yang memutuskan. Negara, ya percaya saja."

Ketua Lembaga Penyuluh Bantuan Hukum PBNU, M Sholeh Amin, menilai ada kecenderungan pergeseran isu dari tuntutan pembubaran Ahmadiyah menjadi pembubaran FPI pascabentrokan di Monas. Menurutnya, keyakinan Ahmadiyah bahwa ada nabi setelah Muhammad SAW merupakan penodaan terhadap agama Islam.

"Upaya melestarikan penodaan agama Islam ini harus dilawan. Jangan bergeser karena isu kekerasan oleh FPI," kata salah satu pimpinan majelis pakar DPP PPP ini.

Politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar, berpendapat, penghormatan terhadap keragaman agama berbeda dengan persoalan penistaan agama. "Jangan sampai masalahnya justru dikaburkan dengan isu kebhinnekaan." Setiap warga negara memang berhak hidup dalam agama dan kepercayaan masing-masing, tapi tak diartikan bebas melakukan penistaan terhadap agama lain. "Kalau Ahmadiyah kemudian menjadi aliran kepercayaan, saya kira tidak akan muncul masalah."

Lima tersangka

Buntut bentrokan di Monas, Polri menetapkan lima tersangka pelaku kerusuhan, termasuk

pimpinan Komando Laskar Islam, Munarman. "Sudah lima orang yang terindikasi sebagai pelaku dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Menko Polhukam, Widodo AS.

Sementara itu, Sekjen GP Anshor, Malik Haramain, mengancam membubarkan FPI jika polisi dan pemerintah tak bertindak tegas. Arbi Sanit, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menuntut pembubaran FPI. Kekerasan yang dilakukan FPI, tambah Arbi, merupakan ancaman terhadap kehidupan bersama.

Di Kab Cirebon, Jabar, sejumlah massa yang mengaku dari Aliansi Warga Nahdliyin (AWN) menyerbu markas FPI Cirebon, Ahad (1/6), sekitar pukul 21.00 WIB. Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam aksi kekerasan di Monas.

Ketua Tim Pengacara Muslim, Mahendradatta, menilai, SBY tidak arif dengan hanya menindak FPI, tapi tidak terhadap Ahmadiyah. [ade/dwo/wed/osa/ann/dri/lis/ant](#)

'Akar Masalahnya Ahmadiyah'

Pemerintah dinilai tidak tegas terhadap Ahmadiyah.

Rabu, 04 Juni 2008

JAKARTA -- Ketua DPR, Agung Laksono, meminta aparat tak hanya bertindak tegas dalam kasus bentrokan massa antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monumen Nasional (Monas), tapi juga berlaku adil.

Para pelaku kerusuhan Monas harus dihukum, tapi masyarakat jangan melupakan akar masalah, yakni Ahmadiyah yang hingga kini belum dibubarkan. "Ini penyebab utamanya menyangkut Ahmadiyah. Harus segera diselesaikan Ahmadiyahnya, sementara pelaku kriminal diproses menurut hukum," kata Agung, Selasa (3/6).

Masyarakat maupun politisi diingatkan agar tak emosional menyikapi bentrokan pada Ahad (1/6) lalu itu. Agung meminta politisi jangan hanya bisa berkomentar, tapi juga aksi nyata menyelesaikan masalah. Sedangkan masyarakat diminta tidak membalas teror dengan teror.

Akar masalah insiden Monas, diakui Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah ketidaktegasan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur.

"Sayangnya, komitmen itu tak pernah muncul. Harusnya pemerintah tegas dan tidak ragu-ragu," katanya. Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, menilai baik FPI maupun AKKBB salah. FPI salah karena melakukan kekerasan di luar prosedur hukum. AKKBB salah karena menempatkan Ahmadiyah sebagai kebebasan berkeyakinan dan beragama.

"Sebenarnya, masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi penodaan agama tertentu, dalam hal ini Islam," katanya. Hasyim menyesalkan sikap pemerintah yang tak tegas terhadap Ahmadiyah. "Pemerintah lebih banyak berwacana daripada melakukan tindakan preventif dan represif."

Menanggapi beberapa pihak yang berupaya menggiring NU terlibat dalam kasus Monas, Hasyim mengimbau agar tidak menyeret NU dengan melakukan aksi unjuk kekuatan, bahkan bentrok fisik dengan massa FPI. Seluruh warga NU diminta tetap tenang dan tak terprovokasi adu domba. "Ini tidak boleh terjadi dan harus dicegah. Kita ingin menyelesaikan masalah Monas, bukan memperluas," katanya.

Di beberapa daerah, sejumlah massa yang tergabung dalam badan otonom NU, seperti GP Anshor, mengancam membubarkan paksa FPI. Usai demo di Mapolwiltabes Surabaya, Ketua GP Anshor Surabaya, Ali Suparto, meminta polisi membubarkan FPI.

"Kalau tidak, kami akan bergerak sendiri," ancam Ali, kemarin. Di Tulungagung, Jatim, massa Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap dikerahkan membubarkan FPI. Di Majalengka, Jabar, ratusan massa dari sejumlah ormas, di antaranya GP Anshor dan Ikatan Pemuda NU, menuntut hal serupa.

Menyikapi memanasnya situasi, pimpinan pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqieh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan.

"Kami akan meredam massa di bawah," kata Maman. Kekerasan, tegasnya, harus dihentikan kepada siapa pun dan atas nama siapa saja.

Kedubes AS

Kemarin, Kedubes AS di Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengutuk aksi kekerasan oleh FPI. AS menilai, aksi itu berdampak serius bagi kebebasan beragama dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Namun, pernyataan Kedubes AS itu dinilai anggota Fraksi PKS di DPR, Soeripto, sebagai bentuk campur tangan AS dalam masalah dalam negeri. "Itu tidak etis. Bahasa kasarnya intervensi. Seakan-akan pemerintah kita yang lemah," katanya.

Sementara itu, kemarin, FPI yang dipimpin Habib Rizieq Shihab melaporkan 289 orang anggota AKKBB ke Polda Metro Jaya. FPI menilai mereka aktor intelektual kerusuhan Monas. Habib juga melaporkan adanya anggota AKKBB yang membawa pistol saat aksi di Monas.

evy/uki/dri/osa/lis/owo/c54/ant

Umat Islam Diminta Bersatu

Semua pimpinan ormas diharapkan menahan diri

Kamia, 5 Juni 2008

JAKARTA -- Umat Islam diminta waspada terkait situasi pascakerusuhan di Monas, Ahad (1/6) lalu. Situasi yang berkembang saat ini dinilai sudah bergeser menjadi ajang adu domba sesama penganut Islam.

Anggota Forum Peduli Umat dan Bangsa (FPUB), Ferry Nur, berharap umat cerdas agar tidak mudah tersulut provokasi yang merugikan. "Siapa yang untung dari pertikaian antara Ansor dan Front Pembela Islam (FPI). Ansor penganut Islam, FPI juga Islam. Mereka jangan mau diadu domba oleh pihak lain," kata Ferry, Rabu (4/6).

Daripada saling serang, Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) ini mengimbau umat bersatu dan menjaga ukhuwah. "FPUB menyeru umat merapatkan barisan."

Koordinator FPUB, KH Fikri Barena, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. "Saya bangga setelah insiden Monas, Presiden berpidato dengan gagah, menyesalkan kejadian itu. Tapi, mengapa Presiden tak berpidato segagah dan setegas itu dalam hal pembubaran Ahmadiyah?"

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, dengan tegas mengatakan tak boleh ada badan otonom ataupun lembaga-lembaga di bawah NU yang mendesak pembubaran FPI. Pembubaran FPI merupakan domain negara. "Itu tidak dalam kapasitas aturan NU," katanya di Makkah kepada Republika.

Hasyim juga tidak menampik bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang menyimpang dari Islam. "Yang penting itu caranya. Dia (Ahmadiyah) kan masih nongkrong di kaum Muslimin. Tentu harus dihadapi dengan dakwah. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan," katanya.

Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Syuhada Bahri, mengimbau para tokoh dan pemimpin masyarakat tidak mudah diadu domba. "DDII tak menyetujui segala bentuk provokasi yang menimbulkan aksi kekerasan."

Ketua DPR, Agung Laksono, menambahkan, potensi konflik horizontal sesama umat pascainsiden sangat besar. Apalagi, situasi politik saat ini sedang panas-panasnya menjelang Pemilu 2009.

Karena itu, dia meminta semua pimpinan ormas menahan diri dan meredam aksi. Dan yang terpenting, surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah harus segera terbit. "Kami harap pemerintah percepat ambil keputusan."

Namun, jangan sampai keputusan itu menimbulkan efek, sehingga ada peluang masyarakat main hakim sendiri. "Masyarakat banyak yang ingin Ahmadiyah bubar karena menyimpang dari agama. Pemerintah harus menyikapi aspirasi ini dengan bijaksana."

Wasekjen DPP PPP, Teuku Taufiqulhadi, yakin jika pemerintah tidak bersikap tegas terhadap Ahmadiyah, di belakang hari akan muncul anggota masyarakat lain

menggantikan FPI. "Posisi FPI dalam kasus Ahmadiyah adalah posisi kebanyakan kaum Muslim Indonesia."

Ketua Umum Persis, KH Shiddiq Amien, meminta pemerintah tegas terhadap Ahmadiyah. "Tapi, kami juga mendesak semua pihak bisa menahan diri," katanya di Bandung.

Juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, menjelaskan, SKB Ahmadiyah masih dalam proses. "Ini tak gampang dan mudah karena menyangkut masalah sensitif. Tapi, kami mencari keputusan yang tepat."

Depdagri tegur Juru bicara Depdagri, Saut Situmorang, mengatakan, Mendagri telah mengirimkan surat teguran ke FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada 3 Juni 2008. "FPI ditegur karena penyerangannya mengganggu ketertiban umum. Sedangkan AKKBB ditegur karena apel akbar dan gerak jalannya memicu insiden penyerangan."

Ormas yang mengganggu ketertiban umum, kata Saut, kepengurusannya dapat dibekukan. "Sedangkan keberadaan AKKBB belum terdaftar." Kemarin, polisi menetapkan pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, sebagai tersangka insiden Monas. "Habib dikenakan Pasal 221 KUHP karena melindungi atau menyembunyikan pelaku tindak pidana dengan ancaman sembilan bulan penjara," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Abubakar Nataprawira.

Pengacara FPI, Mahendradatta, menyatakan, status tersangka itu belum sah. "Karena berita acara pemeriksaan (BAP) belum selesai." Panglima Komando Laskar Islam, Munarman, yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka, membantah dia melarikan diri. "Saya belum datang ke Polda agar hukum berjalan lebih adil dan seimbang."
evy/uba/dam/kie/djo/ann/c54/osa/c65/nap

14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi

Pemerintah seharusnya mencermati akar masalah

Jumat, 06 Juni 2008

JAKARTA--Forum Umat Islam (FUI) menuntut pemerintah tak berlebihan merespons insiden Monas, Ahad (1/6) lalu. Sikap berlebihan justru menciptakan ketegangan dan menambah provokasi terjadinya adu domba.

"Saya tidak tahu siapa yang mengadu domba, tapi adu dombanya sudah terjadi di mana-mana," kata penasihat FUI, Ahmad Sumargono, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/6). Pemerintah juga diminta adil dan tidak diskriminatif menangani kasus tersebut. Pengerahan ratusan personel polisi bersenjata lengkap yang memburu anggota Front Pembela Islam (FPI) dipertanyakan urgensinya. "Padahal, mereka bukan teroris," kecamnya.

Kelambanan pemerintah membubarkan Ahmadiyah justru menjadi pangkal masalah. "Pemerintah berkali-kali janji (soal Ahmadiyah). Pemimpin yang memberi pernyataan dan tak mewujudkan, bagaimana bisa dipercaya?" Bentuk sikap adil pemerintah, kata KH Didin Hafidhuddin, semua pihak yang terlibat harus diproses.

Di tempat terpisah, Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) yang terdiri atas berbagai elemen kepemudaan menyerukan umat tak terjebak adu domba. "Insiden Monas kental rekayasa intelijen asing yang sengaja menghendaki bentrokan sosial antarumat Islam," kata Ketua PB HMI MPO, Syahrul Effendi Dasopang.

FPMI juga menolak pengalihan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melambungnya harga-harga menjadi isu konflik agama dan kekerasan. "Kami melihat adanya indikasi pengalihan isu," kata Ketua Gema Pembebasan, Elwin El-Jundi. "Kalau pemerintah sigap dan cepat mengambil keputusan soal Ahmadiyah, insiden Monas tak akan terjadi," tambah Ketua Umum KAMMI, Taufiq Amrullah.

Usai menjenguk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan insiden Monas berpotensi menimbulkan konflik antarumat Islam. Karenanya, pemerintah diminta mencermati akar masalahnya.

"Ahmadiyah adalah anak-anak bangsa dan saudara sebangsa juga, tapi mereka tak bisa seenaknya," katanya. Kebebasan beragama dan penistaan agama adalah dua hal berbeda. Di Yogyakarta, mantan ketua MPR, Amien Rais, meminta masyarakat menahan diri. Akar kerusuhan Monas, yaitu pro-kontra Ahmadiyah, adalah rekayasa politik. "Rezim yang gagal menyejahterakan rakyat, menambah pengangguran dan kemiskinan, pasti akan mencari isu untuk mengalihkan perhatian rakyat."

Mengenai SKB Ahmadiyah, Mensesneg, Hatta Rajasa, mengatakan prosesnya memang butuh waktu lama, asalkan hasilnya menyejukkan. "Kami ingin begitu keluar SKB, kondisinya kondusif, suasana damai, tenang, dan tak ada permusuhan."

Kemarin, sweeping anggota FPI oleh polisi masih berlanjut. Dengan berkekuatan 480 personel gabungan Polda Metro Jaya, kata Waka Satreskrim Polres Jakarta Barat, AKP Luthfie S, diamankan 20 anggota FPI yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Abubakar Nataprawira, mengungkapkan, dari 20 tersangka yang

masuk DPO, tujuh anggota FPI telah ditahan, termasuk Habib Rizieq. Lima pasal KUHP dijatuhkan kepada Habib, yakni penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan, menyebar kebencian, dan menyembunyikan pelaku tindak pidana.

Kuasa hukum dari Advokasi Anti-Ahmadiyah, Ari Yusuf Amir, mengatakan, Habib Rizieq menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) karena pasal yang dijatuhkan dianggap tak memenuhi unsur tuduhan. Polisi juga dinilai tak adil karena tak memproses laporan FPI tentang 289 orang anggota AKKBB. [ann/c64/hri/evy/djo/dwo/c54/c62/osa/yli/c63/san/kie/lis](#)

Ustadz Jeffry: SBY Harus Adil

Deplu RI minta Kedubes AS Tak terlalu banyak komentar insiden Monas.

Sabtu, 7 Juni 2008

JAKARTA—Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mencari penyebab insiden Monas, Ahad (1/6) lalu. Hal itu dikatakan pimpinan Uje Center, Ustadz Jeffry Al Buchori (Uje), seraya berharap pemerintah harus adil.

Tak mungkin konflik itu mencuat, katanya, jika tanpa penyebab. "Asapnya saja dihilangkan, tapi apinya tak mau disiram, kan tidak bisa," ungkap Ustadz Jeffry di Jakarta, Kamis (5/6) malam usai pertemuan dengan 50 ustadz di Masjid Raya Pondok Indah.

Dengan kejadian itu, umat Islam harus meperkuat persatuan dan jangan mau diadu domba. Kepada masyarakat non-Islam, ustadz Jeffry juga mengimbau agar bersikap bijaksana. "Biarkan kami menyelesaikan urusan agama kami," tegasnya.

Bertempat di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, usai shalat Jumat, Forum Umat Islam menggelar tabligh akbar. Hadir di antaranya Ketua MUI, KH Cholil Ridwan; Ketua KISDI, Ahmad Sumargono; juru bicara HTI, Ismail Yusanto; Sekjen KISPA, Ustadz Ferry Nur; dan KH Rasyid Abdullah Syafi'i.

Usai tabligh akbar, puluhan peserta mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka menjenguk pimpinan FPI yang ditahan, Habib Rizieq Shihab. "Pemimpin harus bijaksana dan adil dalam proses hukum yang sedang berlangsung," kata Ustadz Ferry Nur.

Ketua Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI), Habib Husein Alatas, meminta pemerintah jernih melihat akar masalahnya. "Jangan mengalihkan permasalahan. Bubarkan Ahmadiyah, itu akar masalah yang tak kunjung dilakukan pemerintah."

Dia meminta pemerintah menghormati fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat. "Dan juga menghormati kerja keras Bakorpakem," pintanya.

Molornya penerbitan surat keputusan bersama (SKB) Ahmadiyah, juga dituding Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menjadi biang masalah.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin, meminta Polri juga harus menindak pihak yang menodai ajaran pokok Islam, karena penodaan bukanlah wujud kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ditanya perkembangan SKB Ahmadiyah, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, mengungkapkan, SKB itu tak akan membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). "Bubar gimana? Peringatan, pembekuan yang ada (di SKB)," katanya.

Tak ada instruksi pembubaran, jelasnya, karena sesuai Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, SKB itu pasti terbit karena menjadi amanat UU tersebut. Kapan terbit? Hendarman tak dapat memastikan. Tapi, secara yuridis, konsep SKB selesai.

Menanggapi kecaman Kedubes AS tentang insiden Monas, juru bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan, kejadian itu merupakan masalah dalam negeri. "Mungkin ada baiknya mereka (AS) tak terlalu banyak berkomentar sebelum terkumpul fakta-fakta yang jelas."
osa/dwo/c64/c54/c68/djo/dri/fer/ghu

Ketua MPR Minta Pemerintah Berlaku Adil

Kalau ada yang mau menambah nabi, itu berarti merusak koridor Islam.

Ahad, 8 Juni 2008

JAKARTA--Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, meminta agar penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah secara adil. "Negara harus mengayomi masyarakat dengan penegakan hukum yang adil," katanya pada Republika, Sabtu (7/6).

Indonesia, menurut Hidayat, merupakan negara yang didasarkan atas hukum. Karena itu, siapa pun pelaku pelanggaran harus ditindak secara hukum. "Apa aksi di Monas itu ada izin atau tidak? Siapa yang melakukan provokasi dan sebagainya," tambahnya.

Pendapat senada dikemukakan sejumlah tokoh Islam, seperti para ulama yang tergabung dalam Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API) dan Ketua DPP PPP Suryadharma Ali. Menurut ketua ADA API, Noer Muhammad Iskandar, terkesan ada ketidakadilan dalam penyelesaian kasus Monas.

Para ulama ADA API tidak setuju pada kekerasan yang terjadi di Monas. Tapi, mereka menginginkan kasus tersebut tetap diselesaikan secara adil. Menurut Noer, sudah jelas saat kejadian Habib Rizieq tidak berada di tempat dan tidak pernah memberikan instruksi pada para aktivis FPI untuk melakukan kekerasan. "Jadi, proses hukum terhadap Habib kurang tepat," ujarnya.

Sambil menyesalkan kekerasan yang terjadi di Monas, Suryadharma Ali juga melihat ada kejangalan pada proses hukum terhadap Habib. Karena, menurutnya, kekerasan itu ulah oknum dan bukan ulah FPI sebagai organisasi, juga bukan ulah Habib. "Harusnya aparat incar oknumnya, bukan Habib," katanya.

Hidayat juga sangat menyesalkan tindak kekerasan yang terjadi di Monas. Menurutnya, wajah Islam bukanlah kekerasan. Tapi, wajah Islam semacam itu tidak berarti membenarkan adanya kelompok yang merusak atau menistakan Islam. Dalam konteks Ahmadiyah, menurutnya, tidak berarti dengan mengatasnamakan kebebasan beragama dan Pancasila, kemudian bisa seenaknya sendiri.

Warga Ahmadiyah, katanya, harus menyadari bahwa umat Islam menjalankan agamanya sesuai dengan koridornya. Ahlussunah wal jamaah (Sunni) dan Syiah, menurutnya, memandang persoalan kenabian sudah selesai dan Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau masih ada pihak yang mau menambah nabi, itu berarti merusak koridor Islam dan mereka tidak bisa mencari pembenaran atas nama demokrasi.

Dalam pernyataan bersama, kemarin, para ulama yang tergabung dalam ADA API meminta pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pembubaran Ahmadiyah. Menurut Noer Muhammad Iskandar, permintaan umat Islam agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah bukan pelanggaran kebebasan. Karena, Ahmadiyah melakukan penistaan terhadap Islam.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI), Mahendradatta, meminta Polri segera menindak provokator dari AKKBB. "Bukti gambar penodongan sudah kita berikan. Begitu juga orasi mereka yang memprovokasi dengan menyebut FPI laskar setan," katanya.

Terkait dengan beredarnya SMS kematian Munarman, Mahendradatta mengatakan kabar itu hanya bohong. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya, Kombes Carlo Tewu, di Jakarta, juga menegaskan Panglima Komando Laskar Islam, Munarman, belum

tewas. "Munarman belum tewas dan hingga kini belum tertangkap," katanya.

Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Eko Budi Sampurno, polisi Sabtu pagi sudah dikerahkan untuk menyisiri daerah-daerah hutan, seperti di kawasan Batujajar, Girimukti, dan Saguling, tempat diisukan ditemukannya jenazah Munarman. Tapi, hasilnya nihil. Pihak keluarga Munarman juga membantah isu tersebut.

Anggota dewan pembina YLBHI, Chairilisyah, tetap percaya Munarman akan datang ke Polda Metro Jaya. "Kami, yang tergabung dalam tim advokasi Palembang untuk Munarman percaya, setelah Ahmadiyah dinyatakan bubar, dia akan datang ke polisi," ujarnya.

Menurut Chairilisyah, saat ini sudah terdaftar 36 orang advokat dan asisten advokat yang siap mendampingi proses hukum Mu narman di polisi atau di pengadilan.

Sejumlah tokoh kemarin menjenguk Habib Rizieq yang ditahan di Polda Metro Jaya. Diantaranya KH Zainuddin MZ dan Rhoma Irama. Keduanya mengatakan akar masalah insiden Monas karena pemerintah tidak tegas dalam menangani kasus Ahmadiyah.
dwo/dri/c64/irf/oed/c63/c54/ayh

CURRICULUM VITAE

<p><u>Data Pribadi</u></p> <p style="text-align: right;"> Nama Lengkap Panggilan Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir Status Alamat Email </p>	<p> Panca Okta Hutabrina Rina Perempuan Makassar, 5 Oktober 1984 Belum menikah Jl Sidomukti GK IV / 952 Timoho Yogyakarta zahra_phoenix@yahoo.com, rina.panca@gmail.com </p>
<p><u>Data Orang Tua</u></p> <p style="text-align: right;"> Nama Ayah Pekerjaan Nama Ibu Pekerjaan Alamat </p>	<p> Jamaluddin. R TNI-AD Maryanah Ibu rumah tangga Kompleks KODIM 1423 Malaka, Kab. Soppeng, Sulawesi-Selatan 90851 </p>
<p><u>Latar Belakang Pendidikan</u></p> <p style="text-align: right;"> Perguruan Tinggi (PT) Sekolah Menengah Umum (SMU) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Dasar (SD) Taman Kanak-kanak (TK) </p>	<p> Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004-2009 SMU Negeri 1 Watansoppeng, Sulawesi-Selatan, 1999-2002 SLTP Negeri 1 Watansoppeng, Sulawesi-Selatan, 1996-1999 SD Negeri 07 Sudirman, Mandai, Sulawesi-Selata, 1990-1996 TK Kartika Chandra Kirana, Mandai, Sulawesi-Selatan, 1989-1990 </p>
<p><u>Pengalaman Organisasi</u></p> <p style="text-align: right;"> Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cabang Yogyakarta Jogja Self Defense (JSD) Forum Lingkar Pena (FLP) Yogyakarta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) </p>	<p> Ketua Departemen Humas, 2006-2008 Instruktur, 2006-sekarang Anggota, 2004-2005 Staf Kajian Strategis KAMMI Komisariat UGM, 2002-2004 Bendahara Umum, 2004-2005 Kabid Kajian Strategis KAMMI Korfak MIPA UGM, 2003-2004 Staf Humas KAMMI DIY, 2006-2008 </p>
<p><u>Pengalaman Kerja/Magang</u></p> <p style="text-align: right;"> Media Online www.vivanews.com PT Aksara Solopos (Harian Umum Solopos) Majalah Suara Muhammadiyah Rumah Sakit Lapangan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) di Bantul Wiraswasta </p>	<p> Kontributor Daerah DIY dan Solo, September-November 2008 Magang Pendidikan sebagai Reporter, 18 November 2007-9 April 2008 Praktikum Media sebagai Reporter, September-November 2007 Humas, Mei-September 2006 Guru Privat Kimia SMU, 2003-2005 </p>
<p><u>Pengalaman Training Kepenulisan</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kepenulisan Freelance di Media Cetak oleh BEM-J KPI Fak Dakwah, Desember 2006 2. Pelatihan Jurnalistik Profetik Mahasiswa oleh K-3 Student Center UIN Sunan Kalijaga, Desember 2006
<p><u>Literatur Komputer</u></p> <p style="text-align: right;"> Microsoft Office Adobe Lainnya </p>	<p> Word, Excel, Power Point Corel Draw, Page Maker, Photoshop, Ulead Video, Movie maker MYOB, Internet </p>

Keterampilan

**Komunikasi
Menulis
Dokumentasi**

Presentasi dan negosiasi
Berita, feature
Fotografi

Demikian, Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

PANCA OKTA HUTABRINA